

KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) memuat informasi kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2016.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Malang, Maret 2017

BUPATI MALANG

Dr. H. RENDRA KRESNA



IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, LKj dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana telah diatur

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 adalah : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALANG YANG MADEP MANTEB MANETEP’.**

Dalam mencapai Visi Kabupaten Malang, telah dijabarkan melalui 7 (tujuh) Misi yang pada tahun 2016 telah mencapai tingkat keberhasilan pada tiap-tiap Misi sebagai berikut :

- MISI 1** : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum tercapai **235%**, dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;
- MISI 2** : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi, tercapai **102,9%** dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;
- MISI 3** : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia tercapai **100,6%**, dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;
- MISI 4** : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif, tercapai **97,13%**, dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;
- MISI 5** : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa tercapai **152,93%**, dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;
- MISI 6** : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang

Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Kemasyarakatan tercapai **112,11%** dan **94,51%** dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;

MISI 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup tercapai **125,38%** dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**.

B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Pada tahun Anggaran 2016 pencapaian Visi Kabupaten Malang yang dijabarkan melalui misi-misi Kabupaten didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Belanja Daerah Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 3.769.545.761.843,84 dan dapat direalisasikan Rp 3.543.196.904.343,89 atau mencapai 94,00%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap misi pada Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian Visi Kabupaten Malang.

Malang, Maret 2017

BUPATI MALANG

Dr. H. RENDRA KRESNA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum.....	3
1. Kondisi Geografis	3
2. Kondisi Topografis.....	3
3. Wilayah Rawan Bencana	7
4. Organisasi Perangkat Daerah.....	8
5. Sumber Daya Manusia Aparatur.....	10
D. Capaian Kinerja Tahun 2015.....	12
E. Dasar Hukum.....	36
F. Sistematika.....	37
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	39
A. Perencanaan Strategis.....	39
1. Visi	39
2. Misi.....	40
3. Tujuan dan Sasaran	41
4. Kebijakan dan Program.....	44
B. Perjanjian Kinerja	59
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	64
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	66
1. Capaian Kinerja.....	66
1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2016.....	66
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015.....	70
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD.....	75
1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional.....	79
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	83

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	104
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	104
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran.....	107
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	113
B. Realisasi Anggaran	116
C. Prestasi Tahun 2016	122
BAB IV PENUTUP	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2016	
- Rencana Kinerja Tahun 2016	
- Pengukuran Kinerja Tahun 2016	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah merupakan komitmen nyata kinerja Instansi Pemerintah dalam satu tahun. LKj disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, serta menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2016.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada intinya adalah instrumen yang digunakan Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta revidi dan evaluasi kinerja.

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator kinerja yang



digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran (Output), dan hasil (Outcome).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani dan disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan menyajikan **Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam** Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang **Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.**

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKj juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Laporan Kinerja Pemerintah juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagai bahan pengambilan kebijakan, serta penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.



C. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis

Karakter Lokasi dan Wilayah

Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara 112°17'10,90" – 122°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" – 8°26'35,45" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km² atau 353.486 Ha (sumber: Kab. Malang Dalam Angka Tahun 2015) terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan dan terletak antara 0-2000 m dari permukaan laut.

Wilayah datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo. Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Jombang
Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Lingkar dalam : Kota Malang dan Kota Batu

2. Kondisi Topografis

Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata



di sebelah utara, timur, selatan dan barat wilayah Kabupaten Malang yaitu: G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Penderman (2.040 m), G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m), G. Bromo (2.329 m), G. Batok (2.868 m), G. Semeru (3.676 m), serta Pegunungan Kendeng (600 m). Kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk mengalir lahan pertanian. Kabupaten Malang memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai Brantas sebagai sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.

Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1° C hingga 26,6° C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71° C hingga 89° C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm.

Struktur penggunaan lahan meliputi permukiman/kawasan terbangun 22,89%, industri 0,21%, sawah 13,10%, pertanian lahan kering 23,70%, perkebunan 6,21%, hutan 28,75%, rawa/waduk 0,20%, tambak kolam 0,03%, padang rumput/tanah kosong 0,30%, tanah tandus/tanah rusak 1,55%, tambang galian C 0,26%, lain-lain 2,82%. (sumber: Kab. Malang Dalam Angka Tahun 2015).

Secara geografis wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir. Klasifikasi pengembangan wilayah adalah hutan bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Beberapa permasalahan pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, terbatasnya ketersediaan lahan. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke pengembangan kawasan sebagai berikut:

- a. Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo meliputi potensi alam yang sangat indah, aktifitas keagamaan dan acara ritual Yadnya Kasada dari masyarakat Tengger yang memiliki keunikan tersendiri, vegetasi yang beragam seperti bunga abadi edelweis, serta flora fauna yang sangat indah;
- b. Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan aktifitasnya antara lain adanya mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan komoditasi budaya termasuk Kirab Budaya Agung, Pesarean yang dikeramatkan, kirab dan Gebyar Suroan;
- c. Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan bendungan yang dikelilingi gunung;



- d. Potensi alam Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.
- e. Potensi Pariwisata Pantai di sepanjang Jalur Lintas Selatan

Untuk efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP):

- a. Wilayah Pengembangan lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:
 - 1) Peningkatan akses jalan tembus Kota Malang;
 - 2) Pengembangan jalan Malang – Batu;
 - 3) Peningkatan konservasi lingkungan;
 - 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang - Bandara Abdul Rahman Saleh; dan
 - 5) Pengembangan permukiman.
- b. Wilayah Pengembangan Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:
 - 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen;
 - 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Pantai Ngliyep;
 - 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan;
 - 4) Percepatan penyelesaian JLS;
 - 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan
 - 6) Pengembangan permukiman.
- c. Wilayah Pengembangan Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara



lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur sebagai berikut:

- 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan;
- 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang;
- 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan;
- 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi.

d. Wilayah Pengembangan Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

- 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo;
- 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan;
- 3) Jalan tembus utama antar kecamatan;
- 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air.

Di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo yang termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.

e. Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

- 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi;
- 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata);
- 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami;
- 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air.

Di kawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

f. Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendang Biru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut,



pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur:

- 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi;
- 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendang Biru dan Bajul Mati (untuk perikanan dan pariwisata);
- 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional;
- 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami);
- 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air.

Di kawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

3. Wilayah Rawan Bencana

Dengan posisi geografis, fisiografis, demografis, geologis, serta topografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung serta memiliki bentang wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana banjir, erosi, longsor dan juga tsunami, antara lain:

- a. Wilayah potensi bencana banjir dan longsor, meliputi:
 - 1) Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
 - 2) Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
 - 3) Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
 - 4) Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
 - 5) Desa Sitarjo dan Desa Tambaksari Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - 6) Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
 - 7) Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
 - 8) Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
 - 9) Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
- b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
 - 1) Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
 - 2) Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;



- 3) Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana bom-bom, laipili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO₄, SO₂) dari Gunung Kelud; dan
 - 4) Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana gas solfatara-fumarola hingga belerang (SO₄) dari Gunung Arjuno – Gunung Welirang.
- c. Wilayah potensi bencana alam gempa bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
 - d. Wilayah potensi bencana alam tsunami meliputi wilayah Kabupaten Malang bagian Selatan yaitu Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
 - e. Potensi Bencana Alam Puting Beliung mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromongan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selengkapnya sebagai berikut:

a. Staf Ahli

b. Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - a) Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum;
 - c) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental.
- 2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - a) Bagian Administrasi Perekonomian;
 - b) Bagian Administrasi Kerjasama;
 - c) Bagian Administrasi Pembangunan; dan



-
- d) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
 - 3) Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Tata Usaha;
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 - d) Bagian Organisasi.
 - c. Sekretariat DPRD**
 - d. Inspektorat Daerah**
 - e. Dinas Daerah, terdiri dari:**
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 13) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 14) Dinas Perhubungan;
 - 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 16) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 18) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 20) Dinas Pertanahan;
 - 21) Dinas Perikanan
 - 22) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 23) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - 24) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 25) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Badan Daerah, terdiri dari:**
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
-



- 4) Badan Pendapatan Daerah;
- 5) Badan Kepegawaian Daerah;
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

g. Satuan Polisi Pamong Praja

h. Rumah Sakit Daerah, terdiri dari:

- 1) RSUD Kanjuruhan Kapanjen, dan
- 2) RSUD Lawang.

i. Kecamatan.

5. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun Sumber Daya Manusia Aparatur yang melaksanakan tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 1
DATA PEGAWAI KABUPATEN MALANG

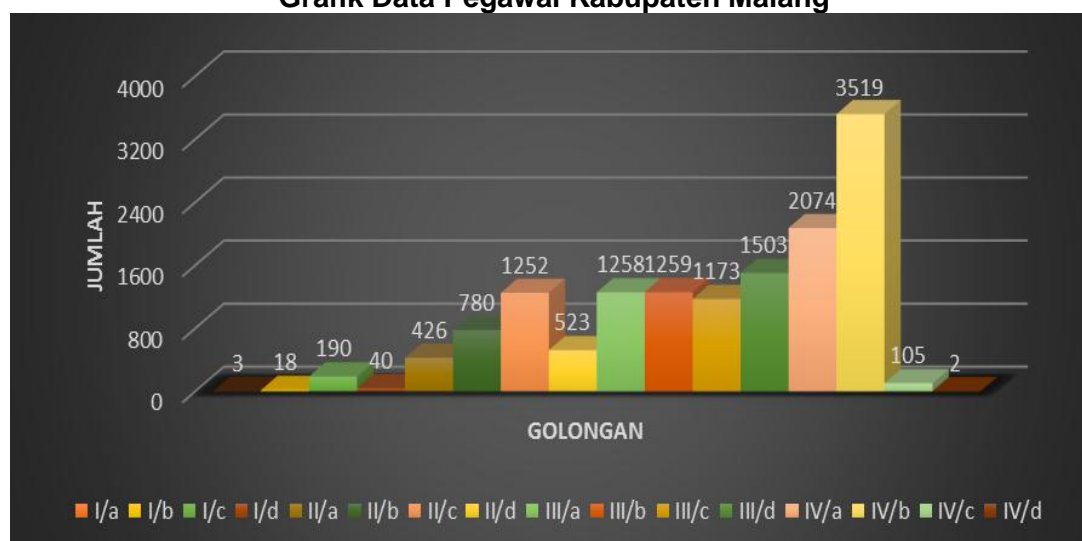
GOLONGAN RUANG	JUMLAH				PERSENTASE			
	Tahun				Tahun			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
GOLONGAN I								
I/a s.d I/d	374	298	266	251	2,28%	1,87%	1,72%	1,78%
GOLONGAN II								
II/a s.d II/d	3.195	3170	3.074	2.981	19,5%	19,89%	19,90%	21,10%
GOLONGAN III								
III/a s.d III/d	5.869	5820	5.723	5.193	35,83%	36,52%	37,06%	36,76%
GOLONGAN IV								
IV/a s/d IV/d	6.940	6648	6381	5.700	42,37%	41,72%	41,32%	40,35%
TOTAL	16.378	15.936	15.444	14.125				

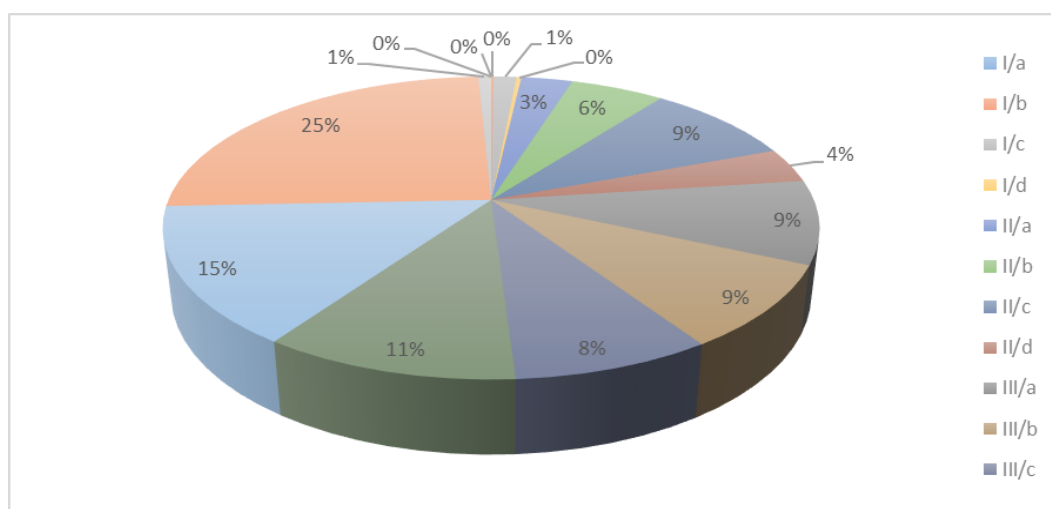
Sumber: Data BKD Kabupaten Malang diolah Januari 2017



Berdasarkan Tabel Data Pegawai Kabupaten Malang, dapat digambarkan bahwa pada tahun 2017, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV merupakan kelompok Golongan PNS dengan jumlah terbanyak dengan persentase 40,35%. Bila dibandingkan dengan jumlah PNS Golongan IV pada tahun 2016 dengan persentase 41,32%, mengalami penurunan sebesar 0,97% kemudian diikuti Golongan III pada tahun 2017 dengan persentase 36,76% bila dibandingkan dengan jumlah PNS Golongan III pada tahun 2016 sebesar 37,06% mengalami penurunan sebesar 0,3%. Untuk Golongan II pada tahun 2017 memiliki persentase 21,10% sedangkan pada tahun 2016 memiliki persentase 19,90%, dilihat dari sisi persentase mengalami kenaikan. Namun dilihat dari sisi jumlah, untuk Golongan II mengalami penurunan sejumlah 93 orang. Selanjutnya untuk PNS Golongan I pada tahun 2017 dengan persentase 1,78% apabila dibandingkan PNS Golongan I pada tahun 2016 dengan presentase sebesar 1,72% mengalami penurunan sebesar 0.06%. Sedangkan dari keseluruhan jumlah PNS pada tahun 2017 sejumlah 14.125 orang apabila dibandingkan dengan jumlah PNS tahun 2016 sejumlah 15.444 orang mengalami penurunan sebesar 8,54%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru serta banyaknya pegawai yang pensiun.

Grafik Data Pegawai Kabupaten Malang





Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang diolah Januari 2017

D. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015

Sebelum diuraikan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2016 terlebih dahulu disampaikan capaian kinerja Tahun 2015 guna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja tahun 2016 yang merupakan tingkat keberhasilan kinerja Kabupaten Malang pada periode tahun terakhir (kelima), sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 yang memuat Capaian Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dalam mewujudkan Visi Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Misi : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya

Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya kehidupan beragama yang baik di lingkungan masyarakat	1. Persentase kesepakatan/rekomendasi hasil pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		2. Tingkat keaktifan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB)	100%	100%	100%



Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas layanan publik dan meningkatnya kualitas tata kelola (governance) Pemerintah Kabupaten Malang	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	78	77,29	99,09%
		2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	WTP	WTP	100%
		3.			
		4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang	Minimal nilai B	Nilai CC	90%

Misi 3 : Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM

Tujuan : Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terpenuhinya hak dan perlindungan hukum terhadap anak serta meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	1. Persentase pengaduan kasus kekerasan anak yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		2. Persentase Penurunan kasus pelanggaran Perda	Menurun 5%	Meningkat 30,52%	Tidak tercapai

Misi 4 : Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai

Tujuan : Terwujudnya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan Damai.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan damai serta meningkatnya ketertiban dan keamanan	1. Persentase Penurunan Konflik Politik yang ditangani	15%	38,4%	256%
		2. Angka kriminalitas yang tertangani	< 5,3	4,3	118,87%



Misi 5 : Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

Tujuan : Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakarya/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakarya/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	1. Persentase penduduk yang mendapatkan air minum	68%	66,64%	98%
		2. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR yang ditetapkan	50%	41,11%	82,22%
		3. Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	93,95%	95,07%	101,19%
		4. Persentase jembatan Kabupaten yang memenuhi standar	44,81%	44,81%	100%
		5. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Malang	2,95%	2,95%	100%
		6. Persentase bauran penggunaan energi baru terbarukan	25%	25%	100%



Misi 6 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing.

Tujuan : Meningkatnya kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan serta aksesibilitas, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1. Angka Partisipasi Kasar a. PAUD b. SD c. SMP d. SMA/SMK	a. 83,06% b. 113,20% c. 98% d. 80%	a. 83,06% b. 113,19% c. 96,42% d. 85%	a. 100% b. 99,99% c. 98,39% d. 106,25%
		2. Angka Partisipasi Murni a. SD b. SMP c. SMA/SMK	a. 99,34% b. 80% c. 75%	a. 99,34% b. 80% c. 75%	a. 100% b. 100% c. 100%
		3. Angka Melek Huruf	98,81%	99,30%	100,49%
		4. Angka Kematian Ibu (AKI)	118/ 100.000 KH	72,22/ 100.000 KH	138,8%
		5. Angka Kematian Bayi (AKB)	24/1000 KH	5,95/ 1000 KH	175,21%
		6. Angka Lulus Sekolah a. SD b. SMP c. SMA/SMK	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 100% b. 100% c. 100%



Misi 7 : Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan

Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga pedesaan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga pedesaan serta meningkatnya kontribusi sektor pendukung PDRB terhadap kesejahteraan masyarakat	Persentase capaian indikator kinerja pembangunan a. PDRB ADHB b. PDRB ADHK c. PDRB ADHB perkapita d. Pertumbuhan ekonomi e. Inflasi f. Angka kemiskinan g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	a. 58.086.549 (juta rupiah) b. 20.555.992 (juta rupiah) c. 22.510.415 (rupiah) d. 6,87% e. 6% - 7% f. 6,90% g. 73,59%	a. 73.984.062,6 (juta rupiah) b. 55.457.752,2 (juta rupiah) c. 28.214.596,90 (rupiah) d. 5,54% e. 6,62% f. 10,96% g. 66,23%	a. 127,37% b. 269,79% c. 125,34% d. 80,64% e. 104,33% f. 158,84% g. 89,99%



Misi 8 : Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Tujuan : Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam	1. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah cair	75%	64,9%	86,53%
		2. Persentase tingkat kelestarian wilayah tambang	2,1%	2,1%	100%

Misi 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya

Pada misi ini kedua indikator berupa persentase kesepakatan/rekomendasi hasil pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti dan tingkat keaktifan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) dapat terealisasi sebesar 100%. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakan pembinaan yang terus-menerus melalui kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi dan pembinaan langsung melalui pertemuan-pertemuan anggota Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) namun demikian apabila dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar masih dirasa perlu penambahan anggaran dalam rangka pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama di wilayah terutama di tingkat kecamatan, sehingga lebih menjamin terpeliharanya kerukunan umat beragama. Langkah-langkah yang diambil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedepan mengajukan peningkatan anggaran kegiatan dan meningkatkan koordinasi dalam persiapan perluasan Forum Kerukunan antar Umat Beragama di wilayah Kabupaten Malang.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.



Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis

Pada Misi ini terdapat tiga indikator yaitu:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada indikator ini realisasi kinerja organisasi mencapai nilai indikator kepuasan masyarakat sebesar 77,29 dari target nilai 78. Meskipun belum mencapai target yang diharapkan namun realisasi kinerja organisasi mencapai nilai 99,09% yang termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Untuk lebih memaksimalkan peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- 1) Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai yang memberikan pelayanan;
- 2) Menyederhanakan proses pelayanan terhadap masyarakat melalui SOP yang baku.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Malang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, sementara untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pendukung perolehan Opini WTP tersebut antara lain:

- 1) Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Pemeriksaan dan pembinaan terhadap LKD melalui pengawasan tahunan (reguler);
- 5) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan BPK RI dilakukan secara rutin;



- 6) Pemeriksaan reguler secara intensif dilakukan Inspektorat pada SKPD yang mengelola anggaran besar;
- 7) Pelaksanaan Diklat terkait SAP.

c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang

Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2015 mendapatkan predikat CC dengan nilai 58,73. Meskipun belum mencapai predikat B sesuai target yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Malang sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang didapatkan pada tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 51,75 dengan predikat CC.

Untuk lebih memaksimalkan peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang langkah-langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan dokumen perencanaan dan membuat aplikasi e-SAKIP.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Misi 3 : Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM

a. Persentase pengaduan kasus kekerasan anak yang ditindaklanjuti

Pengaduan kasus kekerasan anak yang ditindaklanjuti di Kabupaten Malang dapat terealisasi 100%. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- 1) Ketersedianya lembaga penyedia layanan perempuan dan anak
- 2) Penguatan dan pengembangan jaringan
- 3) Keterbatasan tenaga konselor dibandingkan dengan wilayah cakupan

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Secara berkelanjutan selalu melakukan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan;
- 2) Ketersediaan Tenaga Konselor disesuaikan dengan wilayah cakupan/kebutuhan;
- 3) Dukungan penganggaran yang proporsional.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi yaitu:



- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- 3) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; dan
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

b. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda

Pada indikator ini, target capaiannya diharapkan menurun sebesar 5%, namun realisasinya terjadi peningkatan kasus pelanggaran Perda sebesar 30,52%. Hal-hal yang mengakibatkan tidak tercapainya target tersebut antara lain:

- 1) Jumlah SDM yang terbatas;
- 2) Wilayah Kabupaten yang luas;
- 3) Minimnya sarana dan prasarana untuk kegiatan penertiban khususnya pembongkaran.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan penambahan jumlah SDM pada Satpol PP dan Linmas Kab. Malang;
- 2) Mengadakan Kegiatan patroli wilayah yang difokuskan pada 10 (sepuluh) Kecamatan di tahun 2016 (Lawang, Singosari, Pakis Karangploso, Dau, Kepanjen, Pakisaji, Bululawang, Turen dan Dampit);
- 3) Mengusulkan Penambahan sarana dan prasarana untuk kegiatan penertiban khususnya pembongkaran.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat dan Pengendalian Keamanan Lingkungan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.



Misi 4 : Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai

a. Persentase Penurunan Konflik Politik yang Ditangani

Indikator ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena realisasinya melebihi yang ditetapkan tersebut.

Langkah-langkah yang diambil dalam mengantisipasi kegagalan pencapaian indikator penurunan konflik politik yang ditangani, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengusulkan pelaksanaan program peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang Intelijen yang akan dimulai dari para Camat se Kabupaten Malang.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi antara lain:

- 1) Program Peningkatan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka teknik pencegahan kejahatan;
- 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan:
 - a) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
 - b) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- 3) Program Pendidikan Politik dengan kegiatan Penyuluhan Politik.

Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

b. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Indikator Kinerja Penurunan Angka Kriminalitas dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya program dan kegiatan yang mencakup koordinasi aparat keamanan dalam penanganan kriminalitas. Namun demikian masih terdapat program dan kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan terdapat keterbatasan anggaran. Untuk lebih memaksimalkan fungsi SKPD dalam rangka ikut mendukung terciptanya rasa aman dikalangan masyarakat dan berperan dalam menurunkan angka kriminalitas maka diharapkan adanya penambahan anggaran. Penambahan anggaran ini dimaksudkan untuk mengakomodir program dan kegiatan yang telah direncanakan pada rencana kerja SKPD yang berkaitan dengan penurunan kriminalitas di daerah seperti halnya kegiatan peningkatan PAMSWAKARSA, Peningkatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) serta Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) demi



menciptakan keamanan dan ketertiban serta peningkatan supremasi hukum dan HAM.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memaksimalkan pencapaian indikator penurunan angka kriminalitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan kembali beberapa program kegiatan yang penting dalam pencapaian kinerja penurunan angka kriminalitas beserta anggaran yang dibutuhkan, dan meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka teknik pencegahan kejahatan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Misi 5 : Mewujudkan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur

a. Persentase penduduk yang mendapatkan air minum

Beberapa kendala dalam melakukan pengukuran capaian kinerja ini adalah:

- 1) Luasnya lingkup wilayah dari sebaran lingkungan permukiman rumah tangga (RT) yang harus dilakukan penilaian kondisi kualitas prasarana dasar permukiman (PDP)-nya;
- 2) Banyaknya ragam jenis fisik masing-masing PDP yang harus dinilai kondisi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan sebuah lingkungan permukiman;
- 3) Tingkat kebutuhan dan pemenuhan PDP yang berbeda untuk setiap lingkungan permukiman;
- 4) Kondisi kualitas PDP yang bisa berubah-ubah dalam masa penilaian; serta
- 5) Metode survei dan penggalan data pada inventarisasi/pendataan kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang masih belum akurat.

Semua kendala tersebut bermuara pada hasil pendataan kondisi kualitas PDP lingkungan permukiman seluruh RT di wilayah Kabupaten Malang yang masih belum akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil kualitas PDP di lapangan. Selain itu untuk melaksanakan survei atau sensus guna menginventarisasi atau mendata serta memantau secara berkelanjutan kondisi kualitas PDP dari sebagian atau seluruh RT yang ada di wilayah



Kabupaten Malang dibutuhkan sumber daya organisasi yang besar khususnya personil dan anggaran.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupaya selalu mereviu dan memperbarui status database infrastruktur cipta karya di Kabupaten Malang, yang mencakup database tentang kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang serta menyusun format baku survey guna pelaksanaan inventarisasi dan baku klasifikasi penilaian kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang berkualitas berdasarkan obyek-obyek air bersih, saluran drainase, jalan lingkungan permukiman dan sarana sanitasi/air limbah, agar didapat kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT sebagai dasar penilaian kinerja atas target kinerja. Database tersebut digunakan sebagai acuan program kerja di masa depan yang lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

b. Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTR yang Ditetapkan

Capaian kinerja Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang hanya sebesar 82,22% tersebut menunjukkan mulai meningkatnya deviasi/penyimpangan antara Perencanaan Tata Ruang (yang dipakai untuk menganalisa Kesesuaian Tata Ruang dari kegiatan-kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon masyarakat) dengan kecenderungan tuntutan masyarakat (khususnya pelaku usaha dan investasi) akan ruang/lahan untuk beraktifitas usaha dan pengembangannya.

Hambatan utama untuk merealisasikan capaian kinerja adalah:

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dipakai untuk menganalisa rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan masyarakat tidak dinamis untuk mengakomodasi perkembangan aktivitas usaha, aktivitas ekonomi dan kepentingan investasi;



- 2) Belum bakunya prosedur dan waktu proses legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- 3) Tidak bakunya muatan/isi dari rancangan materi dan Rancangan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR); serta
- 4) Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan muatan/isi dari rancangan materi Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR) dimaksud.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, dilakukan langkah-langkah antara lain:

- 1) Fokus kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini dititikberatkan pada upaya mempercepat proses legalisasi atas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang Tahun 2010;
- 2) Mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah Kabupaten Malang lainnya dengan titik berat pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berkembang pesat, memiliki nilai strategis dalam perkembangan wilayah, atau mendesak untuk dilakukan penataan ruang agar tidak terjadi penurunan daya dukung lingkungannya.
- 3) Peningkatan kualitas analisa pemanfaatan ruang terhadap rencana pemanfaatan ruang/lahan yang dimohonkan masyarakat agar tingkat kesesuaian tata ruangnya lebih akurat dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan ruang kawasan dan lokasi yang dimohon.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

c. Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 101,19% sehingga masuk kategori sangat berhasil. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Telah dilaksanakannya motto 'Salob" (sapu lobang) yang merupakan program unggulan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, yaitu segera menambal jalan yang berlubang berdasarkan laporan dari warga masyarakat melalui *call center* yang telah tersedia;



- 2) Pelaksanaan pekerjaan di lapangan telah sesuai perencanaan yang baik dan tepat sasaran;
- 3) Adanya optimalisasi pagu anggaran ke dalam bentuk kegiatan yang menunjang tercapainya IKU.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

d. Persentase Jembatan Kabupaten yang Memenuhi Standar

Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100% sehingga masuk kategori sangat berhasil. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Pelaksanaan pekerjaan jembatan di lapangan telah sesuai perencanaan dan standar serta tepat sasaran;
- 2) Adanya pengawasan dan monitoring yang baik, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat selesai tepat waktu;
- 3) Adanya optimalisasi pagu anggaran ke dalam bentuk kegiatan yang menunjang tercapainya IKU.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

e. Persentase Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Malang

Capaian kinerja pada indikator Persentase peningkatan rumah layak huni di Kabupaten Malang mencapai realisasi sebesar 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah:

- 1) Faktor alami, yaitu:
 - Peningkatan pertumbuhan alami (pembangunan/rehabilitasi rumah yang dilaksanakan masyarakat)
 - Pembangunan rumah oleh Pengembang
- 2) Faktor dukungan pemerintah, dalam hal ini Badan Perumahan Kabupaten Malang sebagai SKPD penanggung jawab Indikator Kinerja Utama, yaitu:



-
- Pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang
 - Pemberian bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas, seperti pembangunan jalan lingkungan (beton atau paving), drainase, sumur resapan, maupun penerangan jalan umum di perumahan swadaya yang pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
 - Dukungan kepada Pengembang, contohnya melalui pemberian bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, sosialisasi mengenai peraturan perundangan di bidang perumahan serta dukungan dalam hal kemudahan penyelenggaraan penyediaan perumahan lainnya.
- 3) Koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah lainnya (baik vertikal dengan Kementerian dan Provinsi, maupun horizontal dengan SKPD Kabupaten Malang yang juga melaksanakan program di bidang perumahan, seperti Dinas Sosial, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang).

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dan Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan Kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

f. Persentase Bauran Penggunaan Energi Baru Terbarukan

Pencapaian kinerja pada indikator ini mencapai realisasi sebesar 100% yang berarti masuk kategori sangat berhasil. Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang, langkah yang dapat dilakukan yaitu :

- 1) Memberikan sosialisasi tentang penggunaan energi baru terbarukan
- 2) Membangun konstruksi energi baru terbarukan
- 3) Kebijakan dari Bapak Bupati Malang untuk lebih memanfaatkan penggunaan energi baru terbarukan yang bersumber dari kotoran/limbah.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan yang berimplikasi



langsung pada peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

Misi 6 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing

a. Angka Partisipasi Kasar

Capaian kinerja organisasi pada indikator ini berada pada kategori sangat berhasil. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi prasarana pendidikan dan sarana pendidikan yang terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran.
- 3) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung implementasi Program Pendidikan Menengah Universal sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 yang dimaksudkan sebagai upaya mendorong percepatan akses serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah. Program PMU ini dilaksanakan untuk menampung lulusan SMP/MTs/ sederajat di SMA/SMK/MA/ sederajat di Kabupaten Malang.

Dalam rangka mengantisipasi kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Memperluas akses layanan pendidikan PAUD dengan membentuk layanan satu desa minimal satu PAUD, Penambahan Ruang Kelas Baru pada daerah daerah pengembangan sehingga dapat menampung penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Rehabilitasi ruang belajar/ruang kelas mulai dari jenjang SD,SMP,SMA/K yang mengalami kerusakan sedang/berat sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan Belajar Mengajar.
- 3) Meningkatkan jumlah usulan siswa penerima bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

Dalam hal pencapaian kinerja tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi antara lain:



-
- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan:
 - a) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Bantuan Provinsi)
 - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
 - b) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
- b. Angka Partisipasi Murni

Capaian kinerja organisasi pada indikator angka partisipasi murni adalah 100% sehingga dapat dikategorikan sangat berhasil. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Meningkatnya anak usia sekolah pendidikan dasar 7–12 tahun dan 13–15 tahun yang tertampung pada lembaga formal maupun non formal (paket A, B dan C). Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah penambahan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang/berat sehingga dapat menambah daya tampung penduduk usia pendidikan dasar dan menengah untuk mendapatkan layanan pendidikan;
- 2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah setara S1/D4;
- 3) Menurunnya peserta didik SD/SMP/SMA/K dan sederajat yang mengalami putus sekolah sehingga dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, serta angka melanjutkan sekolah;
- 4) Peningkatan jumlah lembaga yang terakreditasi “minimal B” untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam rangka mengantisipasi kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan penambahan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan perbaikan / rehabilitasi ruang kelas rusak melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan;
- 2) Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya;
- 3) Mengusulkan sertifikasi dan pemberian tunjangan pendidikan lainnya ke Kemdikbud;
- 4) Mengusulkan akreditasi sekolah ke BNSP;
- 5) Mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk melaksanakan standar minimal pendidikan (SNP).



Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi antara lain:

- 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan:
 - a) Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi;
 - b) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP;
 - c) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS;
 - d) Penyelenggaraan Paket A setara SD.

c. Angka Melek Huruf

Capaian kinerja organisasi pada indikator ini adalah 100,49% sehingga dapat dikategorikan sangat berhasil. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan dalam menekan dan menurunkan Angka Buta Huruf di Kabupaten Malang dilaksanakan melalui:

- 1) Orientasi program pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan melalui kegiatan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Peningkatan kapasitas tutor keaksaraan, yang dilaksanakan melalui pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- 3) Peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Keaksaraan;

Dalam rangka mengantisipasi kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pendidikan keaksaraan;
- 2) Revitalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- 3) Pelatihan Tutor Keaksaraan;

Dalam pencapaian kinerja, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pendidikan Non Formal dengan kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

d. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)



Angka Kematian Ibu Tahun 2015 sebesar 72,22 per 100.000 KH dengan capaian kinerja sebesar 138,8%. Realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 62,28 per 100.000 KH dan lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 89,31 per 100.000 KH. Kenaikan AKI tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 disebabkan:

- 1) Meningkatnya jumlah ibu hamil yang berusia diatas 35 tahun sebanyak 11 kasus dibanding tahun 2014 sebanyak 6 kasus;
- 2) Jumlah estafet penolong meningkat yaitu 11 kasus yang estafet penolongnya 3 atau lebih sedangkan pada tahun 2014 hanya 8 kasus;
- 3) Tingginya kasus pre Eklampsi dan Eklampsi (keracunan kehamilan) yaitu 17 kasus dan seringnya kasus ini terlalu dianggap biasa-biasa saja oleh penderita dan keluarganya karena sering tidak ada keluhan;
- 4) Tingginya kasus HPP (Haemoragia Post Partum/Perdarahan pasca lahir) yaitu sebesar 11 kasus yang disebabkan manajemen aktif kala III kompetensi tenaga kesehatan masih kurang baik di fasilitas primer (negeri dan swasta) dan pada fasilitas sekunder (rumah sakit) kecepatan dalam keputusan penanganan masih kurang;
- 5) Kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas. Solusi untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini adalah pelatihan kegawatdaruratan neonatal bagi petugas puskesmas.

Angka Kematian Bayi Tahun 2015 sebesar 5,95 per 1.000 KH lebih rendah bila dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 6,09 per 1.000 KH dan lebih tinggi bila dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 4,68 per 1.000 KH. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Hal ini berarti target AKB (Angka Kematian Bayi) di Kabupaten Malang tahun 2015 telah tercapai dan menunjukkan keberhasilan program kesehatan keluarga terutama menurunnya angka kematian bayi.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Malang antara lain:

- 1) Adanya kegiatan pelatihan antara lain:
 - a) Kegiatan Kelas Ibu Hamil adalah kegiatan yang mempersiapkan ibu hamil agar melahirkan bayi dengan selamat (penyuluhan kehamilan, pelayanan pada saat kehamilan sampai konsumsi gizi pada ibu hamil;

- b) Kegiatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) adalah pelayanan yang diberikan kepada bayi dan balita yang sakit, meskipun demikian khusus untuk bayi muda (umur < 2 bulan) tetap diberikan pelayanan kesehatan meskipun tidak sakit;
 - c) Pelatihan pendampingan ibu hamil resiko tinggi kepada kader;
 - d) Pelatihan Konselor ASI;
 - e) Pelatihan pemberian makanan bayi dan anak.
- 2) Adanya sistem kajian penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir melalui kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) oleh Tim Spesialis dan Manajemen Rumah Sakit sebagai upaya untuk mencegah kejadian terulang kembali;
 - 3) Adanya pelayanan imunisasi kepada bayi dan balita, hal ini dapat diketahui dari cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 103,40% (41.264 bayi);
 - 4) Adanya program yang menunjang penurunan kematian bayi, balita dan ibu antara lain : Program EMAS, SUTERA EMAS, CONTRA WAR, LAUNCHING SMS BUNDA;
 - 5) Pembinaan AMP per Korwil Puskesmas.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

e. Angka Lulus Sekolah

Angka Lulus Sekolah Kabupaten Malang pada tahun 2015 mencapai nilai 100%. Keberhasilan dalam mempertahankan angka kelulusan mencapai 100% pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dicapai melalui:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran;
- 2) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- 3) Pemberian bantuan beasiswa, untuk menekan angka putus sekolah.

Untuk mempertahankan prestasi tersebut dan mengantisipasi kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, langkah–langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong penggunaan sarana teknologi informatika (IT) dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar;
- 2) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan workshop dan pelatihan;



- 3) Mengusulkan penambahan alokasi siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar pada semua jenis dan jenjang pendidikan;

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi antara lain:

- 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Paket B setara SMP;
 - b) Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa;
 - c) Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD, MI, SMP;
 - d) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DAK);
 - e) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (Pendamping DAK);
 - f) Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa (Bantuan Provinsi).
- 2) Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan:
 - a) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
 - b) Penyelenggaraan Paket C setara SMU;
 - c) Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d) Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA, SMK, dan MA;
 - e) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bantuan Provinsi).
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik;
 - b) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - d) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e) Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi).
- 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan;
 - b) Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan;
 - c) Pembinaan Dewan Pendidikan;
 - d) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan;



- e) Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang berbagai Isu Pendidikan.

Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Misi 7 : Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Capaian indikator kinerja pembangunan pada misi ini diukur melalui 7 (tujuh) indikator yaitu :

- a. PDRB ADHB
- b. PDRB ADHK
- c. PDRB ADHB perkapita
- d. Pertumbuhan ekonomi
- e. Inflasi
- f. Angka kemiskinan
- g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Seluruh indikator tersebut menunjukkan angka capaian di atas 85% sehingga masuk ke dalam hasil kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian indikator tersebut merupakan keterlibatan dari berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sinergisitas perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai dari berbagai sumber menjadi mutlak dilakukan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bisa terwujud, baik antar sektor maupun antar waktu. Sinergisitas pembangunan antar sektor merupakan kesesuaian program pembangunan antar sektor sehingga tidak ada tumpang tindih dalam program pembangunan, tetapi justru saling mendukung. Sedangkan sinergisitas pembangunan antar waktu merupakan keberlangsungan program pembangunan (*sustainable development*) dari waktu ke waktu yang berkelanjutan hingga tujuan dan sasaran pembangunan tersebut tercapai.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi antara lain:

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi;



- 2) Program Kerjasama Pembangunan;
- 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Program Perencanaan Sosial Budaya;
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- 8) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
- 9) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Misi 8 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

- a. Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Memenuhi Baku Mutu Limbah Cair

Pencapaian kinerja pada indikator persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah cair dilakukan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin terhadap kualitas limbah cair dari 32 pelaku usaha/kegiatan. Hasil pemantauan dan pengujian kualitas limbah cair yang dilakukan menunjukkan realisasi sebesar 64,90% dengan capaian sebesar 86,53% yang berarti masuk kategori sangat berhasil.

Tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena:

- 1) Terjadinya perubahan di lingkup internal kegiatan/usaha seperti adanya penambahan kapasitas produksi yang tidak/belum diimbangi oleh peningkatan kinerja IPAL-nya, sehingga berimplikasi terhadap kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada;
- 2) Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada beberapa kegiatan/usaha, seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolahan limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal;
- 3) Rendahnya kapasitas dan kepedulian SDM yang bertanggungjawab dalam pengoperasian IPAL;
- 4) Kurang optimalnya upaya pemeliharaan IPAL yang dilakukan pelaku usaha/kegiatan, seperti tidak dilakukannya pembersihan berkala pada saluran penyaringan limbah sehingga mempengaruhi/menurunkan kinerja pengolahan limbah pada tahap-tahap berikutnya.



Selain itu secara umum pencapaian kinerja pada indikator persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah cair menghadapi beberapa kendala antara lain:

- 1) Rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan perbaikan/mengoptimalkan kinerja IPAL sehingga kualitas limbah cair yang dihasilkan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- 2) Ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan.

Terhadap adanya kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan melalui solusi/strategi pemecahan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha/kegiatan khususnya yang bertanggungjawab pada operasional dan pemeliharaan IPAL melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis maupun kursus dan pelatihan;
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan, dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau. Hal tersebut dikarenakan program-program tersebut mendukung dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi baik melalui pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran pelaku usaha/kegiatan untuk mengupayakan pemenuhan terhadap baku mutu limbah cair serta melalui pengawasan secara kontinu oleh SKPD.

b. Persentase Tingkat Kelestarian Wilayah Tambang

Pencapaian kinerja pada indikator persentase tingkat kelestarian wilayah tambang dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan juga pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menunjukkan realisasi sebesar 2,10%. Realisasi ini menunjukkan capaian sesuai target sebesar 2,10% sehingga didapatkan capaian sebesar



100,00% yang berarti masuk kategori sangat berhasil. Hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan yaitu:

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat akan aturan pertambangan;
- 2) Bertambahnya pengetahuan masyarakat penambang akan teknik pertambangan;
- 3) Adanya sosialisasi dan pengawasan kepada penambang.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memberikan sosialisasi aturan dan teknik pertambangan yang benar;
- 2) Melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap ijin tambang;
- 3) Menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap pertambangan tanpa ijin.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan serta Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.

E. Dasar Hukum

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malang dilaksanakan dengan berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

F. Sistematika

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis
2. Kondisi Topografis
3. Wilayah Rawan Bencana
4. Organisasi Perangkat Daerah
5. Sumber Daya Manusia Aparatur
6. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2016

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

4.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

4.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

4.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi Tahun 2016

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- Rencana Kinerja Tahun 2016
- Pengukuran Kinerja Tahun 2016



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perencanaan Strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang Madep Manteb Manetep, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

1. Visi

Pengertian Visi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 harus dicapai pada tahun 2021. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan



program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Malang tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah, namun juga menyesuaikan dengan RPJM Nasional dan Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka visi dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”.

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Penggunaan istilah MADEP MANTEB MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Adapun arti nilai filosofis dari istilah MADEP MANTEB MANETEP yakni:

Pertama, niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah **Madep**.

Kedua, untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam pelaksanaan pembangunan, atau disebut dengan **Manteb**.

Ketiga, untuk tujuan pembangunan Kabupaten Malang dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah **Manetep**

2. Misi

Pengertian Misi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:



-
- MISI 1** : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
 - MISI 2** : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
 - MISI 3** : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia;
 - MISI 4** : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
 - MISI 5** : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
 - MISI 6** : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
 - MISI 7** : Memperkokoh kesadaran dan perilaku kemasyarakatan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3. Tujuan dan Sasaran

3.1. Tujuan

Pengertian tujuan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Instansi Pemerintahan, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berikut ini tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan antara lain:



1. Misi 1 **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum** dengan tujuan:
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan berbudaya lokal serta menumbuhkan kerukunan kehidupan beragama;
2. Misi 2 **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi** dengan tujuan:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Misi 3 **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia** dengan tujuan:
Meningkatkan daya saing daerah;
4. Misi 4 **Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif** dengan tujuan:
Meningkatkan perekonomian masyarakat;
5. Misi 5 **Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa** dengan tujuan:
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang responsive, transparan dan akuntabel;
6. Misi 6 **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial ekonomi kemasyarakatan** dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
 - b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan.
7. Misi 7 **Memperkokoh kesadaran dan perilaku kemasyarakatan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup** dengan tujuan:
Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang



dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

Misi Kesatu : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum.

Sasaran : a. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama;
b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik;
c. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah.

Misi Kedua : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi

Sasaran : a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi Ketiga : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia

Sasaran : a. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan

Misi Keempat : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif



-
- Sasaran : a. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif
- Misi Kelima : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa**
- Sasaran : a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa;
b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.
- Misi Keenam : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat**
- Sasaran : a. Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi Dan Telematika;
b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar;
c. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- Misi Ketujuh : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup**
- Sasaran : a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
b. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif.

4. Kebijakan dan Program

4.1. Kebijakan

Kebijakan umum merupakan sarana untuk mencapai tujuan disertai target yang hendak dicapai. Kebijakan umum yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Malang guna mempertajam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/terstruktur.

Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun sebagai tahap operasional dari upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Malang selama lima tahun ke depan yang menggambarkan keterkaitan



antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Berikut ini akan dijabarkan kebijakan umum dari tiap-tiap Misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Strategi dan Arah Kebijakan yang ada, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan tiga strategi umum sebagai prioritas dalam kegiatan pembangunan pada periode tahun 2016-2021. Ketiga strategi umum tersebut ialah:

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata;
3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Strategi umum menurunkan angka kemiskinan. Sebagaimana telah diketahui, kemiskinan menjadi masalah serius yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Posisi Pemerintah Kabupaten Malang dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah menjadi fasilitator yang melayani masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi.

Strategi umum mengoptimalkan potensi sektor pariwisata. Perkembangan industri pariwisata akan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang menyasar pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sarana edukasi akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup. Misalnya, pada pengembangan industri ekowisata, kondisi alam yang bagus akan menarik perhatian wisatawan untuk datang berwisata.

Strategi umum memperkuat daya dukung lingkungan hidup. Lingkungan hidup berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, lingkungan hidup juga memberikan efek berupa bencana yang dapat menimbulkan kerugian. Efek ini akan terjadi bilamana kualitas lingkungan hidup tidak dijaga dengan baik. Pemerintah Kabupaten Malang memiliki komitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup karena potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kabupaten Malang cukup potensial.

Ketiga prioritas strategi umum ini bukan kemudian menyingkirkan kebijakan lain dalam kaitannya dengan kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang. Akan tetapi posisinya hanya sebatas sebagai prioritas yang merupakan hasil pengembangan dengan merujuk kondisi potensi dan masalah di Kabupaten Malang. Di bawah ini akan dijelaskan arah kebijakan per misi pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:



Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum.

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Arah Kebijakan berupa:

1. Peningkatan kegiatan sosialisasi kerukunan keagamaan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat atau agama;
2. Peningkatan materi forum akan bahaya konflik SARA;
3. Optimalisasi peran kelembagaan FKUB melalui kegiatan dialog antar umat beragama yang tersosialisasikan tokoh agama;
4. Peningkatan sosialisasi hasil rekomendasi mengenai kerukunan umat beragama yang ditindaklanjuti;
5. Peningkatan jumlah media dakwah dalam mengembangkan isu-isu toleransi atau nilai keberagaman;
6. Optimalisasi pada pendataan jumlah sarana dan peningkatan sarana;
7. Optimalisasi pengawasan sebagai sarana peredam konflik politik;
8. Peningkatan penanganan melalui penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui wawasan kebangsaan;
10. Peningkatan tindak lanjut pada tindakan kriminal;
11. Peningkatkan sosialisasi melalui sarana media TIK;
12. Peningkatan kerja aparaturnya dalam meningkatkan pengawasan Perda;
13. Peningkatan pengawasan terhadap potensi konflik sosial di daerah;
14. Peningkatan kegiatan pencegahan konflik di daerah;
15. Peningkatan infrastruktur panggung pertunjukan untuk seni dan budaya;
16. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan lokal
17. Peningkatan pemberdayaan kelompok seni dan budaya lokal;
18. Peningkatan partisipasi masyarakat, terhadap penanganan PMKS melalui optimalisasi media publik;
19. Peningkatan PMKS yang memperoleh bantuan sosial;
20. Peningkatan kegiatan bimbingan motivasi dalam PMKS;
21. Peningkatan jaminan sosial melalui distribusi yang merata dan nterawasi;
22. Peningkatan kapasitas perempuan dan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
23. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah.



Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Arah Kebijakan berupa:

1. Peningkatan kegiatan pelatihan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat;
2. Peningkatan ketersediaan e-government dengan sarana yang menunjang;
3. Peningkatan akurasi dan kualitas dokumen kependudukan;
4. Peningkatan pelatihan melalui materi konsep pelayanan prima;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti sosial;
6. Peningkatan pelaksanaan melalui pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi;
7. Peningkatan program pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang terdistribusi merata;
8. Peningkatan ketersediaan layanan web yang menyediakan fasilitas pelayanan publik;
9. Peningkatan sosialisasi website;
10. Peningkatan evaluasi hasil nilai opini BPK;
11. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan untuk audit;
12. Optimalisasi pengembangan kapasitas melalui tindak lanjut hasil kegiatan;
13. Meminimalisir kerugian daerah melalui pengawasan keuangan daerah;
14. Peningkatan kapasitas tindak lanjut melalui sosialisasi hasil pemeriksaan;
15. Peningkatan penyusunan laporan kinerja berdasarkan indikator dalam SAKIP;
16. Peningkatan hasil LPPD yang ditindak lanjuti;
17. Peningkatan hasil pemeriksaan melalui kegiatan evaluasi;
18. Peningkatan RTRW dengan melibatkan tenaga ahli;
19. Peningkatan ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan Tata Ruang;
20. Peningkatan mediasi pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan RTR;
21. Peningkatan program prioritas dalam fokus agenda kebijakan;
22. Peningkatan program berbasis pada potensi dan masalah daerah;
23. Optimalisasi perumusan program kelitbangan yang berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan;
24. Peningkatan penyelenggaraan FGD antar PD dalam perumusan program dan kegiatan pendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah;
25. Meningkatkan kerja sama antar daerah dengan konsep jejaring pemerintahan;



26. Peningkatan hasil penyusunan SOP dan SKM yang ditindaklanjuti;
27. Peningkatan penyusunan peraturan daerah berbasis masalah dan potensi;
28. Peningkatan penyusunan peraturan bupati berbasis masalah dan potensi;
29. Peningkatan penyusunan instruksi bupati berbasis masalah dan potensi
30. Peningkatan penyusunan keputusan berbasis masalah dan potensi;
31. Peningkatan publikasi melalui sarana media informasi yang mudah dijangkau masyarakat;
32. Peningkatan sosialisasi kegiatan Musrenbang;
33. Peningkatan peran melalui kegiatan sosialisasi pembangunan daerah;
34. Peningkatan penerapan anggaran PD yang sesuai dengan pedoman teknis pemerintah;
35. Peningkatan kualitas dokumen berdasarkan potensi dan masalah PD;
36. Peningkatan arah kebijakan yang mengaitkan isu-isu strategis dan memperhatikan pagu indikatif anggaran dan pencapaian program RKPD;
37. Peningkatan sosialisasi seluruh hasil-hasil kelitbang kepada publik melalui website atau media informasi lainnya pada tiap tahun anggaran;
38. Peningkatan publikasi melalui sarana media informasi yang mudah dijangkau masyarakat;
39. Peningkatan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video;
40. Peningkatan publikasi melalui kerja sama dengan pihak media masa non pemerintah;
41. Peningkatan kegiatan sosialisasi yang ditindak lanjuti;
42. Peningkatan kegiatan pengembangan kapasitas camat;
43. Peningkatan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi kepegawaian;
44. Peningkatan pengembangan aparatur yang profesional dan berkualitas;
45. Peningkatan disiplin dan etika aparatur.

Misi 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan arah kebijakan berupa:

1. Peningkatkan serapan tenaga kerja dengan memberikan fasilitas kegiatan bursa kerja;
2. Peningkatan pasar serapan kerja melalui sosialisasi industri padat karya;



3. Peningkatan sosialisasi pendidikan sekolah penduduk usia 25 tahun dan pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu;
4. Peningkatkan serapan tenaga kerja dengan mengevaluasi kurikulum yang relevan sesuai kebutuhan kerja;
5. Peningkatan pemberian beasiswa kepada siswa yang tidak mampu;
6. Peningkatan aksesibilitas layanan SD, SMP, SMA/MA/SMK pada calon siswa;
7. Peningkatan APK dan APM dengan sosialisasi dan pemberian beasiswa pada siswa tidak mampu;
8. Peningkatan rekrutmen dan evaluasi melalui database pengajar di setiap sekolah;
9. Peningkatan sosialisasi melalui aksesibilitas layanan sertifikasi;
10. Peningkatan pemerataan sarana pendidikan formal dan informal di setiap wilayah;
11. Peningkatan keaktifan melalui sosialisasi kegiatan olah raga melalui media;
12. Peningkatan lomba sebagai sarana seleksi siswa-siswi berprestasi di tingkat daerah;
13. Peningkatan sosialisasi agenda lomba kepemudaan;
14. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur fasilitas olahraga;
15. Peningkatan layanan kesehatan terhadap ibu dan bayi/balita anak usia sekolah, remaja, maternal di setiap wilayah;
16. Peningkatan Posyandu melalui keaktifan kader kesehatan;
17. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan nilai/skor pola pangan harapan melalui pemasyarakatan penganekaragaman pangan;
18. Peningkatan sosialisasi layanan sertifikasi kepada setiap industri rumah tangga pangan;
19. Peningkatan sosialisasi bahaya polio terhadap masyarakat;
20. Peningkatan penanganan kasus diare di tempat layanan kesehatan;
21. Peningkatan sosialisasi bahaya penyebaran HIV/AIDS kepada masyarakat;
22. Peningkatan pelaksanaan jentik nyamuk dan fogging;
23. Meningkatkan Pendampingan, Penyuluhan dan sosialisasi Desa Siaga Aktif (purnama mandiri);
24. Meningkatkan Pendampingan, Penyuluhan dan sosialisasi Rumah Tangga Sehat;
25. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang;



-
26. Peningkatan pembelian obat yang diusulkan setiap tempat layanan kesehatan;
 27. Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan perorangan di RSUD;
 28. Peningkatan program pemerintah pusat mengenai jaminan kesehatan dan layanan gratis untuk warga miskin dengan memberikan aksesibilitas layanan kesehatan bagi warga miskin;
 29. Peningkatan ketersediaan data keluarga dan KB yang tervalidasi;
 30. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui capaian indikator angka harapan hidup pada waktu lahir;
 31. Peningkatan pemerataan melalui capaian indeks gini dan Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia;
 32. Peningkatan kegiatan yang menunjang pencapaian target indeks gini;
 33. Peningkatan investasi sektor usaha masyarakat;
 34. Peningkatan pengawasan hasil retribusi pelayanan pasar terhadap PAD;
 35. Peningkatan stabilitas melalui kegiatan Pelaksanaan Monitoring harga sembako dan barang penting lainnya;
 36. Peningkatan kegiatan pelatihan ketenagakerjaan profesional;
 37. Peningkatan layanan terhadap investor;
 38. Peningkatan sarana informasi kepada investor melalui media;
 39. Peningkatan pengawasan berdasarkan Perpu;
 40. Peningkatan kegiatan pelatihan pengembangan produksi ekspor kepada pelaku usaha;
 41. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus koperasi dan UMKM;
 42. Peningkatan pengawasan berdasarkan aturan hukum ketenagakerjaan;
 43. Peningkatan TPAK;
 44. Peningkatan sosialisasi aturan kependudukan/transmigrasi;
 45. Peningkatan kegiatan UPPKS melalui sosialisasi di media;
 46. Peningkatan pengeluaran perkapita pertahun;
 47. Peningkatan pendapatan terhadap warga miskin;
 48. Pemberian lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan terhadap penduduk miskin;
 49. Peningkatan implementasi indikator IPM dalam berbagai kegiatan;
 50. Peningkatan kegiatan pelatihan industri padat karya;
 51. Peningkatan kegiatan pengembangan kapasitas pendamping usaha mikro;
 52. Peningkatan daya beli masyarakat melalui program akselerasi yang tersosialisasikan;



53. Peningkatan lembaga melalui kegiatan pelatihan terhadap pengurus lembaga kredit mikro;

54. Peningkatan kapasitas pendamping usaha ekonomi produktif masyarakat;

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Arah Kebijakan berupa:

1. Peningkatan hasil produksi pertanian, hortikultura, kehutanan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, melalui kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di setiap wilayah;
2. Peningkatan hasil daging, susu, telur, produksi melalui kegiatan penyuluhan di setiap wilayah;
3. Peningkatan laju pertumbuhan melalui kondusifitas lingkungan, kegiatan padat karya, pemberian bantuan ekonomi terhadap masyarakat miskin;
4. Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB;
5. Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB;
6. Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB;
7. Peningkatan pertumbuhan sektor kehutanan terhadap PDRB;
8. Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor perikanan terhadap PDRB;
9. Peningkatan subsidi pupuk pertanian yang merata;
10. Peningkatan pengawasan penggunaan sarana irigasi;
11. Peningkatan ketersediaan ikan untuk kebutuhan konsumsi;
12. Peningkatan penyuluhan terhadap peternak;
13. Peningkatan daya saing melalui kegiatan pelatihan terhadap pelaku industri;
14. Peningkatan kelembagaan melalui kegiatan pelatihan terhadap kader koperasi;
15. Peningkatan pertumbuhan melalui kegiatan pelatihan terhadap calon pengusaha.

Misi 5 : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Arah Kebijakan berupa :

1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten;
2. Peningkatan jalan kabupaten;
3. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan kabupaten;



4. Peningkatan/penggantian jembatan kabupaten sesuai standar;
5. Peningkatan jaringan jalan melalui perencanaan tata wilayah;
6. Peningkatan pengadaan infrastruktur halte di wilayah yang sudah dilayani angkutan umum;
7. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan;
8. Peningkatkan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan Peningkatkan penyuluhan sadar keselamatan terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji;
9. Peningkatan cakupan wilayah yang terlayani jaringan internet;
10. Peningkatan kualitas sumber air;
11. Peningkatan infrastruktur layanan air minum;
12. Peningkatan aksesibilitas pemanfaatan air limbah;
13. Peningkatan penanganan kawasan prioritas perumahan dan permukiman;
14. Peningkatan kegiatan bedah rumah;
15. Penurunan backlog perumahan;
16. Peningkatan implementasi penggunaan tata ruang yang sesuai dengan RTR;
17. Peningkatan kinerja petugas kebersihan dan keamanan pasar melalui kegiatan gathering;
18. Peningkatan infrastruktur sarana perdagangan;
19. Peningkatan infrastruktur sarana pariwisata;
20. Peningkatan ketersediaan sarana infrastruktur pertanian;
21. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan energi alternatif pada masyarakat;
22. Peningkatan sarana bangunan air;
23. Peningkatan ketersediaan infrastruktur panjang saluran air primer dan sekunder.

Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku kemasyarakatan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

Guna mewujudkan tujuan misi ini, ditentukan Arah Kebijakan berupa:

1. Peningkatan capaian kegiatan dalam indikator IKLH;
2. Peningkatan pengawasan wilayah tambang;
3. Peningkatan jumlah tenaga dan infrastruktur kebersihan di desa dan kota;
4. Peningkatan pencapaian indikator indeks tutupan hutan;
5. Peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat;
6. Peningkatan kualitas udara melalui pengawasan dan pengendalian pencemaran udara pada kegiatan usaha;



7. Peningkatan kualitas udara melalui pengawasan dan pengendalian limbah cair kegiatan/usaha;
8. Meningkatkan ketersediaan air tanah melalui pembangunan sumur resapan;
9. Melakukan penanaman pohon di sekitar sumber air;
10. Peningkatan kegiatan untuk capaian Indeks Pencemaran Air;
11. Peningkatan pengawasan terhadap SDA melalui sosialisasi terhadap masyarakat;
12. Peningkatan pengelolaan berbasis konsep sustainable development;
13. Peningkatan kegiatan yang disertai partisipasi masyarakat;
14. Peningkatan pengelolaan keseimbangan lingkungan melalui konsep sustainable development;
15. Peningkatan kualitas udara melalui kegiatan penghijauan dan pengawasan terhadap pencemaran udara;
16. Peningkatan Jumlah desa tangguh bencana;
17. Peningkatan peran lembaga kebencanaan dalam penanganan bencana;
18. Peningkatan pemberdayaan masyarakat mengenai resiko bencana;
19. Peningkatkan kualitas peran badan penanggulangan bencana.

4.2. Program

Misi Kesatu : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum.

- Program :**
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 2. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan;
 3. Program Pendidikan Non Formal;
 4. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas;
 5. Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
 7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;



-
9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 12. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 13. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
 14. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 15. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Misi Kedua : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi

- Program :
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
 3. Program Peningkatan Pelayanan Publik;
 4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
 5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah;
 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 11. Program Pengembangan Data/Informasi;
 12. Program Program Kerjasama Pembangunan;
 13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;



-
14. Program Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
 15. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 16. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
 17. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
 18. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;
 19. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa;
 20. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Misi Ketiga : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia

- Program :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
 3. Program Pendidikan Menengah;
 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 5. Program Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan;
 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
 8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan);
 9. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
 10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
 13. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 14. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang;
 15. Program Peningkatan Iklim Investasi;
 16. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspora;



-
18. Program Resi Gudang;
 19. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
 20. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
 21. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 22. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
 24. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Misi Keempat : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.

- Program :
1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
 4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
 5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
 6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 7. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 8. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
 10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
 11. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
 12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 13. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
 14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 15. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;



16. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau.

Misi Kelima : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa

- Program :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);
 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
 7. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
 8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Program pembangunan infrastruktur Pedesaan;
 10. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Misi Keenam : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat

- Program :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
 5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;



9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

Misi Ketujuh : Memperkokoh kesadaran dan perilaku kemasyarakatan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

- Program :
1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 5. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas;
 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
 7. Program Infrastruktur Pedesaan;
 8. Program Pengembangan Perumahan;
 9. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 10. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
 11. Program Pemanfaatan Ruang;
 12. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar;
 13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 14. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 16. Program Pengembangan Kemitraan;
 17. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi;
 18. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.



B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2016 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan indikator kinerja sasaran untuk masa lima tahun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Indikator kinerja sasaran memiliki target kinerja tahunan untuk jangka menengah. Indikator kinerja utama juga memiliki target kinerja tahunan dalam jangka menengah sesuai dengan dokumen RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2016. Penetapan indikator kinerja utama/sasaran sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2016 disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2016 dengan tema **“Kestinambungan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur Khususnya Perdesaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pembangunan Desa Dalam Mendukung Daya Saing Daerah ”**.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

- MISI 1** : **Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum**
- Tujuan** : **Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%
3. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	5%
	2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	5%



Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	77,50
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	WTP
3. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B
	2. Kategori Nilai LPPD	Sangat Baik Posisi 11 Besar Nasional

Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	66,64 - 67,24
	2. Indeks GINI	0,331 - 0,327



Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,59%

Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Responsive, Transparan dan Akuntabel

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	$\geq 70\%$
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\leq 10\%$

Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	60%
	2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	44,81%



	3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	3,43%
	4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	70%

Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	82%
	2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	80,23%
	3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	97,50%
2. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	8,34%
	2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	65%

Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,56
2. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	17 desa
	2. Persentase Penanganan Bencana	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir isian data kinerja Target dan Realisasi Tahun 2016, yang diisi oleh Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dihitung dan diukur.

Pengumpulan data kinerja merupakan tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran Capaian Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja berupa laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Malang melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing-masing misi Kabupaten Malang dengan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian rencana} \\ \text{tingkat capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian rencana} \\ \text{tingkat capaian} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang, ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

85 keatas	:	Sangat Berhasil
70 X < 85	:	Berhasil
55 X < 70	:	Cukup Berhasil
X < 55	:	Kurang Berhasil



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja

1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam tahun 2016 sebagai berikut:

Misi 1 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum

Tujuan : Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%	20%	100%
3	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	5%	8%	160%
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	5%	29%	580%



Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	77,50	82	105,8%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	WTP	-	-
3	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		2. Kategori Nilai LPPD	Sangat Baik Posisi 11 Besar Nasional	Menunggu Pengumuman	-

Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	66,64 - 67,24	67,54	100,4%
		3. Indeks GINI	0,331 - 0,327	0,330	100,9%



Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,59%	5,43%	97,13%

Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Responsif, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	≥ 70%	88,10%	125,8%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	≤ 10%	2%	180%

Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	60%	63,32%	105,53%



No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	44,81 %	50,64%	113,01%
		3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	3,43 %	4,42%	128,9%
		4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	70%	71%	101,4%

Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	82%	72,65%	88,59%
		2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	80,23%	75,5%	94,10%
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	97,50%	97,50%	100%
2	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian rusak air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	8,34%	6,85%	82,13%
		2. Persentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	65%	70,02%	107,72%



Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,56	64,03	117,36%
2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	17 desa	27 desa	158,8%
		2. Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Misi 1 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum

Tujuan : Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2015 (n-1)	Th. 2016 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%	20%	20%
3	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	5%	5%	8%
		2. Persentase	5%	-	29%



No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2015 (n-1)	Th. 2016 (n)
		Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal			

Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2015 (n-1)	Th. 2016 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	77,50	77,29	82
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	WTP	WTP	-
3	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	CC	B
		2. Kategori Nilai LPPD	Sangat Baik Posisi 11 Besaran Nasional	Sangat Baik Posisi 12 Besaran Nasional	-



Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2015 (n-1)	Th. 2016 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	66,64 - 67,24	66,63	67,54
		2. Indeks GINI	0,331 - 0,327	0,330	0,330

Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2015 (n-1)	Th. 2016 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,59%	5,27%	5,43%

Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Responsif, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2015 (n-1)	Th. 2016 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	≥ 70%	85,78%	88,10%



No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2015 (n-1)	Th. 2016 (n)
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	≤ 10%	0	2%

Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2015 (n-1)	Th. 2016 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan Prasarana Transportasi dan Telematika Sarana Jalan, dan	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	60%	95,07%	63,32%
		2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	44,81%	44,81%	50,64%
		3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	3,43%	8,22%	4,42%
		4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	70%	68%	71%



Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2015 (n-1)	Th. 2016 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	82%	66,64%	72,65%
		2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	80,23%	70,66%	75,5%
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	97,50%	96,22%	97,50%
2	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	8,34%	8,34%	6,85%
		2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	65%	65%	70,02%

Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th. 2015 (n-1)	Th. 2016 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,56	51,07	64,03
2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	17 desa	20 desa	27 desa
		2. Persentase Penanganan Bencana	100 %	100%	100%



1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Misi 1 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum

Tujuan : Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2016	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%	20%	100%
3	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	45%	8%	17,78%
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	25%	29%	116%

Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2016	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	80	82	102,5%



No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2016	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	WTP	-	-
3	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	A	B	33,33%
		2. Kategori Nilai LPPD	Sangat Baik Posisi 6 Besar Nasional	-	-

Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2016	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	69,70-70,50	67,54	95,80%
		2. Indeks GINI	0,304-0,300	0,330	110%

Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2016	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	6,00%	5,43%	90,5%



Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Responsif, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2016	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	≥70%	88,10%	125,86%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	75%	20%	26,67%

Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2016	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan Prasarana Transportasi dan Telematika Sarana Jalan, dan	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	75%	63,32%	84,43%
		2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	62,64%	50,64%	80,84%
		3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	17,23%	4,42%	25,65%
		4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	85%	71%	83,53%



Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2016	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	100%	72,65%	72,65%
		2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	95%	75,5%	79,47%
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	97,70%	2,5%	2,56
2	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	10%	6,85%	68,5%
		2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	72,23%	70,02%	96,94%

Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Th. 2016	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,50	64,03	93,47%
2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	32 Desa	27 desa	84,37%
		2. Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%



1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Misi 1 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum

Tujuan : Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2016	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	-	Tidak ada data realisasi nasional
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%	-	Tidak ada data realisasi nasional
3	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	8%	-	Tidak ada data realisasi nasional
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	29%	-	Tidak ada data realisasi nasional

Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2016	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	1. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	82	77	Tidak ada data realisasi nasional



No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2016	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2. Opini BPK RI	WTP (untuk LKPD Tahun 2015)	WTP	Sama dengan realisasi nasional
3	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	Sama dengan realisasi nasional
		2. Kategori Nilai LPPD	-	10 besar nasional	-

Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2016	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	67,54	-	Tidak ada data realisasi nasional
		2. Indeks GINI	0,330	0,39	Di bawah realisasi nasional

Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2016	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,43%	5,02%	Di atas realisasi nasional



Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Responsif, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2016	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	88,10%	-	Tidak ada data realisasi nasional
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	20%	-	Tidak ada data realisasi nasional

Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2016	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan Prasarana Transportasi dan Telematika Sarana Jalan, dan	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	63,32%	-	Tidak ada data realisasi nasional
		2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	50,64%	-	Tidak ada data realisasi nasional
		3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	4,42%	-	Tidak ada data realisasi nasional
		4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	71%	-	Tidak ada data realisasi nasional



Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2016	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	72,65%	-	Tidak ada data realisasi nasional
		2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	75,5%	-	Tidak ada data realisasi nasional
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	97,50%	-	Tidak ada data realisasi nasional
2	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian rusak air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	6,85%	-	Tidak ada data realisasi nasional
		2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	70,02%	-	Tidak ada data realisasi nasional

Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2016	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,03%	63,5%	Di atas realisasi nasional
2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	27 desa	-	Tidak ada data realisasi nasional
		2. Persentase Penanganan Bencana	100%	-	Tidak ada data realisasi nasional



2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Solusi

Misi 1 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum

Pada misi ini terdapat 4 (empat) indikator yaitu persentase kesepakatan/rekomendasi hasil pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti, persentase penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, persentase pemberdayaan kelompok seni dan budaya lokal, serta persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan lokal.

a. Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti.

Indikator kinerja ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan perhitungan 16 rekomendasi hasil pertemuan FKUB telah ditindaklanjuti keseluruhan. Berdasarkan data tersebut maka indikator Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang Ditindaklanjuti mengalami keberhasilan. Hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan adalah pembinaan yang terus menerus dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi dan pembinaan langsung melalui pertemuan-pertemuan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah yaitu mengajukan peningkatan anggaran kegiatan dengan meningkatkan koordinasi dalam persiapan perluasan Forum Kerukunan Beragama di wilayah. Apabila dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar masih dirasa perlu untuk penambahan anggaran dalam rangka pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama di wilayah terutama di tingkat kecamatan, sehingga lebih menjamin terpeliharanya kerukunan umat beragama.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

b. Persentase Penanganan Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Indikator Kinerja pada Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara dari Target 20% (15 kasus), terealisasi 20% dengan formula atau rumus jumlah kasus yang selesai diproses dibanding jumlah kasus



yang ditangani dikalikan 100% (4 dibanding 20 dikalikan 100% sama dengan 20%) dengan capaian 100%.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja tersebut di atas mengalami keberhasilan. Adapun hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- 1) Proses Administrasi Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berjalan dengan tepat;
- 2) Koordinasi antar Lintas Perangkat Daerah berjalan lancar.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Proses Administrasi Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dapat berjalan dengan tertib;
- 2) Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara bagi aparat selaku kuasa hukum;
- 3) Perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

c. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal.

Indikator Kinerja ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi sebesar 8%. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab tercapainya indikator persentase pemberdayaan kelompok seni dan budaya lokal antara lain:

- 1) Adanya program/kegiatan diluar rencana tahunan banyak menyerap anggaran sehingga pada akhirnya target awal rencana yang sudah ditentukan dapat tercapai.
- 2) Adanya tambahan dana hibah seni budaya dari pemerintah pusat maupun daerah untuk kelompok seni budaya masyarakat mengakibatkan pelaksanaan program kegiatan kelompok seni budaya menjadi maksimal;
- 3) Jumlah kelompok seni dan budaya yang berprestasi sesuai dengan yang diharapkan dan meningkatnya keikutsertaan pada even-even lomba seni budaya yang ada.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah antara lain memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok kesenian dan senimannya serta memfasilitasi kelompok-kelompok kesenian.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian



kinerja organisasi adalah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal

Target dari indikator ini sebesar 5% dan tercapai sebesar 29%. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab tercapainya target sasaran strategis meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya antara lain:

- 1) Adanya pembinaan secara berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok seni masyarakat;
- 2) Adanya fasilitasi kegiatan seni budaya masyarakat;
- 3) Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah antara lain mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan kelompok kesenian yang ada di daerah tersebut, dan mengapresiasi masyarakat terhadap kekuatan budaya lokal (genius lokal).

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi

Pada Misi ini terdapat empat indikator yaitu Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, Opini BPK RI, Predikat Akuntabilitas Kinerja, dan Kategori Nilai LPPD.

a. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat

Pada indikator ini realisasi kinerja organisasi tercapai sebesar 8,2 dari target nilai 77,5. Nilai 8,2 diperoleh dari rata-rata nilai SKM seluruh Perangkat Daerah. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa indikator ini masuk dalam kategori berhasil karena tingkat capaiannya sebesar 105,8%. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- 2) Seluruh Perangkat Daerah telah menyusun survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat.



Untuk memaksimalkan peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- 1) Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai yang memberikan pelayanan;
- 2) Menyederhanakan proses pelayanan terhadap masyarakat melalui SOP yang baku.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Malang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 sementara untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Adapun hal-hal utama yang menjadi pendukung keberhasilan perolehan Opini WTP, antara lain:

- 1) Penatausahaan Keuangan dan Aset yang semakin tertib;
- 2) Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 3) Peningkatan pencapaian target kinerja;
- 4) Kecepatan dan ketepatan pengumpulan data dari perangkat daerah di wilayah Kabupaten Malang untuk dapat menyajikan laporan realisasi anggaran dengan tepat waktu dan akurat.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan tersebut dan sebagai langkah peningkatan Capaian Kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kualitas penatausahaan keuangan dan aset melalui bimtek, rekonsiliasi serta pendampingan;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah;
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur pengelolaan keuangan di seluruh perangkat daerah dalam menyongsong penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual melalui sosialisasi, bimbingan teknis maupun pelatihan di bidang keuangan;
- 4) Peningkatan dan pembaharuan infrastruktur jaringan dalam mendukung sistem informasi manajemen keuangan secara online, mengingat wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas demi terwujudnya kecepatan dan



ketepatan data sehingga diharapkan laporan realisasi anggaran dapat diterbitkan secara online.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program yang menunjukkan outcome paling mendukung bagi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah.

c. Predikat Akuntabilitas Kinerja

Indikator Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2016 yang ditargetkan mendapatkan predikat B tercapai B dengan nilai 62,24. Pemerintah Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari nilai Akuntabilitas Kinerja yang didapatkan pada tahun sebelumnya yaitu predikat CC dengan nilai 58,72. Pencapaian tahun ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga dapat dikategorikan mengalami keberhasilan. Adapun hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan yaitu:

- 1) Adanya komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan sampai dengan level staf untuk memperbaiki kinerjanya;
- 2) Adanya koordinasi yang baik dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam pemenuhan kualitas dokumen SAKIP;
- 3) Adanya mekanisme yang jelas terkait kelengkapan data dan pengumpulan data.

Untuk memaksimalkan peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Menyempurnakan dokumen perencanaan;
- 2) membuat aplikasi e-SAKIP;
- 3) Menyusun indikator kinerja individu, perjanjian kinerja, rencana aksi, dan laporan kinerja dari eselon III sampai dengan level staf.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.



d. Kategori Nilai LPPD

Nilai LPPD tahun 2016 baru akan diumumkan sekitar bulan April 2017, sedangkan LPPD pada tahun 2015 memperoleh nilai sangat baik posisi 12 besar nasional. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
- 2) Data Penyusunan LPPD dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan sebagai langkah peningkatan Capaian Kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan;
- 2) Mengikuti pelatihan bagi aparatur pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Daerah. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat 2 indikator kinerja pada misi ketiga ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi IPM Kabupaten Malang pada tahun 2015 berada pada level 66,63 sedangkan Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 67,54. Keberhasilan pembangunan manusia ditentukan oleh keberhasilan semua dimensi/komponen baik kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan daya beli. Keberhasilan satu dimensi ditunjang oleh keberhasilan dimensi yang lain. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:



- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan pada bidang pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya nilai komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah;
- 2) Meningkatnya nilai angka harapan hidup di Kabupaten Malang;
- 3) Meningkatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Malang karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan yang dilihat dari meningkatnya nilai komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan bidang kesehatan salah satunya meningkatnya nilai angka harapan hidup di kabupaten malang serta meningkatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Malang.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dan lingkungan sehat yang dapat dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.;
- 2) Meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan melalui penambahan fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau khususnya mendidikan menengah atas, dan menurunkan rasio guru terhadap murid dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan;
- 3) Meningkatkan pengembangan lapangan pekerjaan melalui pemberian kemudahan investasi dan perijinan usaha, perlindungan tenaga kerja dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

b. Indeks GINI

Koefisien/Indeks gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal, yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Nol merupakan pemerataan sempurna, sedangkan satu merupakan ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kabupaten Malang yang diperoleh dari data BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 adalah data tahun 2015 yang nilainya sebesar 0,330 sedangkan untuk data Indeks Gini tahun 2016 masih dalam proses penghitungan



BPS Provinsi Jawa Timur. Dari capaian kinerja dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Gini Kabupaten Malang mengacu pada nilai gini rasio, berarti tingkat ketimpangan konsumsi perkapita Kabupaten Malang masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang (antara 0,3–0,5). Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Memperbaiki layanan umum untuk memperbaiki kesehatan, pendidikan dan peluang keluarga berencana;
- 2) Membuka akses dan variasi lapangan pekerjaan yang lebih baik;
- 3) Menggunakan pajak dan belanja daerah untuk mengurangi ketimpangan melalui program/kegiatan hibah/bantuan sosial, bantuan usaha mikro kecil, kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat program perlindungan sosial seperti beasiswa pendidikan;
- 2) Menyediakan pelatihan dan keterampilan kerja;
- 3) Meningkatkan ketaatan dalam pengumpulan pajak perorangan.

Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif

Pada misi keempat hanya ada satu indikator kinerja yaitu **Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2015 sebesar 5,27 persen dan pada tahun 2016 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang mampu tumbuh atau meningkat menjadi sebesar 5,43 persen. Besaran pertumbuhan ekonomi yang terjaga tersebut akan menjadi basis bagi akselerasi peningkatan besaran Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Peningkatan ekonomi terjadi pada lapangan usaha tradables dan non tradables. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Meningkatnya industri pengolahan sejalan dengan peningkatan ekspor dan peningkatan permintaan lokal;
- 2) Meningkatnya permintaan lokal dan kinerja ekspor, yang kemudian berdampak pada meningkatnya pertumbuhan pada lapangan usaha non tradables, antara lain lapangan usaha konstruksi, perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, ketenagalistrikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- 3) Meningkatnya sektor industri pengolahan yang masih menjadi penyokong utama perekonomian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, serta



sektor konstruksi, terutama sektor konstruksi sejalan pembangunan infrastruktur di Malang Selatan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah;

- 4) Meningkatnya konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup kuat sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan;
- 5) Struktur penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu relatif tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung mengkonsumsi lebih besar dari usia non produktif;

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah penting untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan ekonomi kreatif. Pada masa yang akan datang, ekonomi kreatif secara umum dan industri kreatif khususnya diyakini akan menjadi primadona. Ada tiga alasan yang mendasari keyakinan tersebut, yaitu hemat energi karena lebih berbasis pada kreativitas, lebih sedikit menggunakan sumber daya alam dan menjanjikan keuntungan lebih tinggi. Ketiga faktor di atas juga ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Malang sekitar 2,5 juta. Populasi yang berusia 15-29 tahun berkisar 582.114 jiwa atau hampir 22,88 merupakan pasar yang sangat gemuk bagi produk-produk industri kreatif;
- 2) Menyediakan tempat bagi para UKM kerajinan, fashion dan ekonomi kreatif lain untuk dapat melakukan pameran dan penjualan, karena produk-produk mereka merupakan salah satu kekayaan Kabupaten Malang yang dapat menghasilkan devisa;
- 3) Menyediakan ruang publik untuk memasarkan produk-produk hasil ekonomi kreatif, dengan mengkombinasikan event-event pariwisata lokal dan seni budaya lokal sebagai modal dasar memasarkan ekonomi kreatif pada potensi lokal masing-masing.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Pada misi ini terdapat dua indikator yaitu Persentase Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dan Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri.



a. Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Adanya regulasi/Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 2) Adanya SDM perangkat Desa yang cukup baik dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan/pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa);
- 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana Desa.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa dan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Indikator Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa ditargetkan <10% dan terealisasi sebesar 2% diperoleh dari jumlah desa mandiri tahun lalu sebesar nol, pada tahun 2016 bertambah menjadi 8 desa mandiri sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- 2) Adanya Peran Pemerintah Desa yang cukup baik dalam pembangunan desa.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Koordinasi lintas sector dalam rangka meningkatkan status desa menjadi desa mandiri;
- 2) Melakukan bimbingan teknis/ sosialisasi pendataan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.



Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.

Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Kemasyarakatan.

Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika.

a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap

Indikator ini memperoleh capaian yang melebihi target, dimana panjang jalan kondisi baik untuk tahun 2016 adalah 1056,66 km atau sebesar 63,32% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1668,76 km. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan “**Salob**” (Sapu Lobang) yang berarti segera menambal setiap ada lubang di Jalan Kabupaten sehingga tidak memperparah kerusakan dan layak untuk mobilitas barang dan jasa;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup lubang-lubang jalan yang ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui;
- 3) Pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran dalam bentuk paket kegiatan yang menunjang dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga berpengaruh pada pencapaian indikator Jalan Kabupaten dalam kondisi baik sehingga melebihi target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tersebut, dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang bertugas untuk melakukan monitoring secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap target dan realisasi indikator kinerja yang pertama;



- 2) Koordinasi mantap antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan agar tetap dalam kondisi baik;
- 3) Pengadaan alat berat untuk menunjang kegiatan pemeliharaan jalan.

Dalam pencapaian kinerja program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja indikator kinerja yang pertama adalah Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Adapun program dimaksud terdapat kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan serta kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, dimana berfungsi untuk mempertahankan jalan tetap dalam kondisi baik.

b. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar

Pada indikator ini dapat terealisasi sebanyak 200 buah atau 50,64% dari total jumlah jembatan kabupaten sebanyak 395 buah. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa indikator kinerja mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Perencanaan teknis yang matang dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan jembatan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan yang optimal turut mendukung dalam upaya pembangunan jembatan sesuai standar 6 meter.
- 3) Pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran dalam bentuk paket kegiatan yang menunjang dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga berpengaruh pada pencapaian indikator.

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tersebut, dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang bertugas melakukan monitoring secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap target dan realisasi indikator kinerja yang kedua;
- 2) Koordinasi mantap antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jembatan sesuai standar 6 meter;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang tentang pembangunan jembatan.

Program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian indikator kinerja yang kedua adalah Program Pembangunan Jalan



dan Jembatan. Hal tersebut dikarenakan didalam program tersebut terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas jembatan Kabupaten sehingga dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

c. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten

Pada tahun 2016 fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sejumlah 1554, dibanding yang seharusnya ada yaitu sebesar 3.512. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 4,42%. Apabila dibandingkan dengan target yang sebesar 3,43%, maka indikator kinerja fasilitas perlengkapan jalan (Marka) pada jalan di Kabupaten Malang mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- 1) Adanya komitmen untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Kabupaten Malang;
- 2) Realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan dari yang ditargetkan karena ada penambahan anggaran sehingga berdampak pada penambahan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan berupa marka pada tahun 2016

Dalam rangka meminimilisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait pada saat merencanakan pengecatan marka jalan.

Dalam pencapaian kinerja program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program peningkatan keamanan dan pengamanan lalu lintas dengan kegiatan Pengadaan Marka Jalan. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

d. Persentase Wilayah yang Terlayani Jaringan Internet

Indikator Persentase Wilayah yang Terlayani Jaringan Internet dengan target 70% terealisasi sebesar 71%. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator ini mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- 1) Pelayanan jaringan internet dilakukan pihak ketiga/provider penyedia jaringan internet;
- 2) Pihak ketiga dalam berinvestasi membangun tower mempertimbangkan untung/rugi, kalau pengguna internet tidak ada, maka pihak ketiga tidak akan membangun tower;



- 3) Dalam mendirikan tower, proses perijinan terlebih dahulu mendapat prioritas serta membutuhkan waktu yang singkat.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi kepada provider penyedia jaringan agar berinvestasi mendirikan tower di wilayah Kabupaten Malang.
- 2) Menyusun dokumen *Cell Plan*/Perencanaan letak tower yang bisa didirikan.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap layanan Publik. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan

a. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Air Bersih

Target yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 85,48% dan terealisasi sebesar 72,65% yang berasal dari 1.860.339 jiwa penduduk yang mendapat pelayanan air minum dibagi keseluruhan penduduk di Kabupaten Malang. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa indikator ini mengalami kegagalan. Beberapa kendala dalam melakukan pengukuran capaian kinerja ini adalah:

- 1) Luasnya lingkup wilayah dari sebaran lingkungan permukiman rumah tangga (RT) yang harus dilakukan penilaian kondisi kualitas prasarana dasar permukiman (PDP)-nya;
- 2) Banyaknya ragam jenis fisik untuk masing-masing PDP yang harus dinilai kondisi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dari sebuah lingkungan permukiman;
- 3) Tingkat kebutuhan dan pemenuhan PDP yang berbeda untuk setiap lingkungan permukiman;
- 4) Kondisi kualitas PDP yang bisa berubah-ubah dalam masa penilaian; serta
- 5) Metode survei dan penggalan data pada inventarisasi/pendataan kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang masih belum akurat.

Semua kendala tersebut bermuara pada hasil pendataan kondisi kualitas PDP lingkungan permukiman seluruh RT yang ada di wilayah



Kabupaten Malang yang belum akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil kondisi kualitas PDP di lapangan. Selain itu untuk melaksanakan survei atau sensus guna menginventarisasi atau mendata serta memantau secara berkelanjutan kondisi kualitas PDP dari sebagian atau seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang dibutuhkan sumber daya organisasi yang besar khususnya personil dan anggaran.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupaya selalu mereview dan memperbaiki status database infrastruktur cipta karya Kabupaten Malang, yang mencakup database tentang kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang serta menyusun format baku survei guna pelaksanaan inventarisasi dan baku klasifikasi penilaian kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang berkualitas berdasarkan obyek-obyek air bersih, saluran drainase, jalan lingkungan permukiman dan sarana sanitasi/air limbah, agar didapat kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT sebagai dasar penilaian kinerja atas target kinerja. Database tersebut akan digunakan sebagai acuan program kerja di masa depan yang lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

b. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah

Jumlah penduduk di Kabupaten yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai yaitu 1.933.310 jiwa. Sedangkan jumlah seluruh penduduk Kabupaten Malang adalah sebesar 2.560.675 jiwa. Sehingga capaian kerjanya hanya mencapai 75,50% dari target 80,23%. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja mengalami kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- 1) Luasnya lingkup wilayah dari sebaran lingkungan permukiman RT yang harus dilakukan penilaian kondisi kualitas Prasarana Dasar Permukiman (PDP)-nya;
- 2) Banyaknya ragam jenis fisik untuk masing-masing PDP yang harus dinilai kondisi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dari sebuah lingkungan permukiman;



- 3) Tingkat kebutuhan dan pemenuhan PDP yang berbeda untuk setiap lingkungan permukiman;
- 4) Kondisi kualitas PDP yang bisa berubah-ubah dalam masa penilaian serta
- 5) Kondisi kualitas PDP yang bisa berubah-ubah dalam masa penilaian serta
- 6) Belum optimalnya pendataan PDP yang melingkupi 33 Kecamatan dikarenakan keterbatasan anggaran

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah antara lain Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Bidang Permukiman berupaya untuk selalu mereview dan memperbaharui status Database infrastruktur Cipta Karya Kabupaten Malang, yang mencakup database tentang kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang serta menyusun format baku survei guna pelaksanaan inventarisasi dan baku klasifikasi penilaian kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang berkualitas berdasarkan obyek-obyek air bersih, saluran drainase, jalan lingkungan permukiman dan sarana sanitasi/air limbah; agar didapat kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT sebagai dasar penilaian kinerja atas target IK-Sasaran, database tersebut juga akan digunakan sebagai acuan program kerja di masa depan yang lebih terarah, berhasilguna dan berdayaguna.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

c. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni di Kabupaten Malang pada tahun 2016 berjumlah 696.886 unit, dengan total rumah yang ada di Kabupaten Malang berjumlah 714.493 unit. Dari data tersebut maka menghasilkan persentase ketersediaan rumah layak huni sebesar 97,50% sesuai target yang ditetapkan yaitu 97,50%. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- 1) Faktor alami, yaitu peningkatan kualitas rumah yang dilaksanakan masyarakat secara swadaya;
- 2) Faktor dukungan pemerintah, yaitu fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 400 unit (Bantuan Stimulan Rumah Swadaya) rumah dengan Dana APBN , 105 unit perbaikan rumah melalui Bantuan



Sosial, serta 2 unit perbaikan pada saat kegiatan bina wisata desa, serta kegiatan sosialisasi rumah sehat;

- 3) Koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah lainnya, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Beberapa kendala dalam melakukan pengukuran capaian kinerja ini adalah belum adanya database perumahan terutama database rumah layak huni.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan pengusulan kegiatan penyusunan Database Perumahan

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

d. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi

Pada indikator sasaran persentase peningkatan luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi, dari target tahun 2016 sebesar 8,50% realisasinya adalah 6,85%. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator kinerja yang mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Adanya perubahan pola tanam, dimana Rencana Tata Tanam Global (RTTG) tidak berjalan sesuai rencana karena perubahan cuaca/perubahan iklim, dampaknya terhadap ketersediaan dan kualitas air irigasi. Selain itu, para petani mengikuti trend tanaman dengan harga jual yang menguntungkan atau yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Masih terdapat kebocoran pada saluran irigasi dan sedimentasi pada saluran juga menjadi penyebab tidak tercapainya target luas area pertanian yang harus dilayani jaringan irigasi;
- 2) Kurang tepat dalam menetapkan target capaian, dimana realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak selalu menunjukkan peningkatan namun ada naik dan turun luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi, sehingga dalam menentukan target semestinya didasarkan pada analisa yang lebih tepat misalnya menyangkut prakiraan musim hujan dan kemarau.



Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah menentukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menggiatkan sosialisasi Rencana Tata Tanam Global (RTTG), sehingga pola tanam petani sejalan dengan pengaturan debit air irigasi. Normalisasi saluran dan pemeliharaan saluran diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan air irigasi dari segi infrastruktur;
- 2) Revisi target capaian, didasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

e. Persentase Panjang Saluran Air Sekunder dalam Kondisi Baik

Pada indikator sasaran persentase panjang saluran primer dan sekunder dalam kondisi baik, dari target tahun 2016 sebesar 68,60% realisasinya adalah 70,02%. Keberhasilan ini disebabkan pada tahun 2016 kegiatan peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi dengan anggaran sebesar Rp 80.772.412.060 atau fisik saluran sepanjang 45.235,85 m, sehingga jumlah saluran primer dan sekunder dalam kondisi baik meningkat menjadi 621.608,37 m dari total panjang saluran primer dan sekunder yaitu 887.751,30 m. Kegiatan pendukung indikator sasaran dimaksud adalah Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Daerah Irigasi dengan kinerja utama meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk irigasi dan infrastruktur pengendali daya rusak air dan indikator kinerja utamanya adalah Persentase panjang saluran primer dan sekunder dalam kondisi baik.

Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja pada indikator sasaran dimaksud pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah menentukan langkah-langkah yaitu melaksanakan secara kontinu pemeliharaan saluran irigasi dan memprioritaskan rehabilitasi terutama pada saluran dengan kondisi rusak berat dan sedang.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.



Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Terdapat tiga indikator pada indikator ini yaitu Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), jumlah desa tangguh bencana, dan persentase penanganan bencana.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didapat melalui perhitungan Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Pencemaran Udara (IPU) dan Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$$

Untuk di Kabupaten Malang, nilai IPA sebesar 50, IPU sebesar 100 dan ITH sebesar 46,83. Dengan menggunakan formula diatas, maka diperoleh hasil IKLH sebesar 64,03. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat tercapai melebihi target yang diharapkan.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas lingkungan di titik-titik yang telah ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup;
- 2) Terlaksananya pengawasan kepada kegiatan/usaha berupa pengujian kualitas limbah cair serta emisi dari kegiatan/usaha sehingga dapat meminimalisir beban pencemaran;
- 3) Semakin banyak kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan sebagai salah satu komitmen kegiatan/usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pengelolaan lingkungan;

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan kepada pelaku usaha/kegiatan dalam rangka ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui pendampingan, sosialisasi dan fasilitasi serta pemberian stimulan dalam pengelolaan lingkungan;



- 3) Meningkatkan edukasi kepada masyarakat sejak usia sekolah tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi antara lain Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air, dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b. Jumlah Desa Tangguh Bencana

Indikator Jumlah Desa Tangguh Bencana, pada tahun 2016 target 17 Desa dan Realisasi 27 Desa maka indikator kinerja ini mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Melakukan kerjasama dengan USAID-APIK;
- 2) Memberdayakan relawan peduli bencana, dan
- 3) Melatih relawan Siaga Bencana.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Jadwal sesuai perencanaan yang baik dan cermat;
- 2) Membagi tenaga yang ada di BPBD dan Relawan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam.

c. Persentase Penanganan Bencana

Pada tahun 2016 di Kabupaten Malang terjadi sebanyak 56 kali kejadian yang kesemuanya dapat tertangani, sehingga realisasi pada indikator persentase penanganan bencana dapat tercapai 100%. Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diketahui bahwa indikator persentase penanganan bencana mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:

- 1) Adanya dukungan dan logistik yang memadai dalam penanganan tanggap darurat bencana;



-
- 2) Koordinasi dan komunikasi lintas organisasi perangkat daerah dan lembaga-lembaga/ potensi lainnya terkait penanggulangan bencana terjalain dengan baik;
 - 3) Didukung sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup untuk tugas-tugas penanganan tanggap darurat bencana.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan penyediaan dana, logistik dan peralatan yang cukup dalam penanganan tanggap darurat bencana;
- 2) Meningkatkan sinergitas antar Perangkat Daerah dan lembaga lainnya yang terkait dalam penanganan penanggulangan bencana;
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanggulangan bencana secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, simulasi/gladi lapang dan lainnya;
- 4) Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, termasuk gotong royong dengan masyarakat.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Kedaruratan dan Logistik.



3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	44.196.000,00	0,0013
2.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	522.705.000,00	0,02
3.	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	3.200.000.000,00	0,1
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	5.951.347.000,00	0,2
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	195.737.100,00	0,006
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	29.033.057.000,00	0,84
6.	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	226.756.000,00	0,007
		2. Kategori Nilai LPPD	149.120.000,00	0,0043
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	410.690.000,00	0,012
		2. Indeks GINI	223.635.000,00	0,006



No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Anggaran (Rp)	% Anggaran
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	1.273.075.000,00	0,037
9.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa	280.290.800,00	0,008
10.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	80.000.000,00	0,002
11.	Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	237.829.855.110,00	6,90
		2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	224.834.433.650,00	6,52
		3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	237.727.000,00	0,007
		4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	2.100.900.150,00	0,06
12.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	6.676.615.000,00	0,2
		2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	30.142.363.300,00	0,9
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	200.155.000,00	0,006
13.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	6.676.615.000,00	0,2
		2. Persentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	30.142.363.300,00	0,9
14.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	6.623.559.327,00	0,2



No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Anggaran (Rp)	% Anggaran
15.	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	50.000.000,00	0,001
		2. Persentase Penanganan Bencana	1.200.000.000,00	0,03



1.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	44.196.000,00	44.196.000,00	100%
2.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%	20%	100%	522.705.000,00	522.705.000,00	100%
3.	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	5%	8%	160%	3.200.000.000,00	3.189.895.000,00	99,68%
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	5%	29%	580%	5.951.347.000,00	5.664.443.900,00	95,18%



No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan public	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	77,50	82	105,8%	195.737.100,00	193.560.000,00	98,89%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	WTP	-	-	29.033.057.000,00	24.726.230.097,00	85,16%
6.	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	226.756.000,00	225941.000,00	99,64%
		2. Kategori Nilai LPPD	Sangat Baik Posisi 11 Besar Nasional	Pengumuman pada bulan april	-	149.120.000,00	148.710.000,00	99,73%
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	66,64 - 67,24	67,54	100,4%	410.690.000,00	399.374.950,00	97,24%



No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		2. Indeks GINI	0,331 - 0,327	0,330	100,9%	223.635.000,00	223.635.000,00	100%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,59%	5,43%	97,13%	1.273.075.000,00	1.261.218.800,00	99,07%
9.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa	≥ 70%	88,10%	125,8%	280.290.800,00	276.740.800,00	98,73%
10.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	≤ 10%	2%	180%	80.000.000,00	71.150.000,00	88,93%
11.	Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	60 %	63,32%	100,5%	237.829.855.110,00	208.821.785.137,60	87,80%



No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		3. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	44,81%	50,64%	100%	224.834.433.650,00	203.060.515.900,00	90,31%
		4. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	3,43 %	4,42%	128,9%	237.727.000,00	231.014.000,00	97,18%
		5. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	70%	71%	101,4%	2.100.900.150,00	2.100.900.150,00	100%
12.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	82%	72,65%	84,9%	51.709.865.496,00	51.491.065.250,00	99,57%
		2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	80,23%	75,5%	94,10%	2.021.112.000,00	2.020.312.000,00	99,96%



No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	97,50%	97,50%	100%	200.155.000,00	192.062.300,00	95,95%
13.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	8,34%	6,85%	80,58%	6.676.615.000,00	6.545.981.559,00	98,04%
		2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	65,00%	70,02%	102,1%	30.142.363.300,00	29.713.409.300,00	98,58%
14.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,56	64,03	117,36%	6.623.559.327,00	6.550.221.000,00	98,89%
15.	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	17 desa	27 desa	158,8%	50.000.000,00	50.000.000,00	100%



No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		2. Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%	1.200.000.000,00	953.671.357,00	79,47%



1.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	100%	0
2.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	100%	100%	0
3.	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	160%	99,68%	37,69%
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	580%	95,18%	83,59%
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	105,8%	98,89%	6,53%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	-	85,16	-
6.	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	100%	99,64%	0,36%
		2. Kategori Nilai LPPD	-	99,73%	-
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	100,4%	97,24%	3,19%



No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		2. Indeks GINI	100,9%	100%	0,9%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	97,13%	99,07%	-1,9%
9.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	125,86%	98,73%	21,55%
10.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	180%	88,93%	11,06%
11.	Meningkatnya pelayanan Prasarana Transportasi Telematika Sarana Jalan, dan	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	100,5%	87,80%	12,64%
		2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	100%	90,31%	9,7%
		3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	128,9%	97,18%	24,58%
		4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	101,4%	100%	1,40%
12.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	84,9%	99,57%	-17,1%
		2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	94,10%	99,96%	-6,2%



No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	100%	95,95%	4,04%
13.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	80,58%	98,04%	-21,6%
		2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	102,1%	98,58%	3,4%
14.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	117,36%	98,89%	15,73%
15.	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	158,8%	100%	37,03%
		2. Persentase Penanganan Bencana	100%	79,47%	20,52%



B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun 2016 dan Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2016, maka pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan yang sah, ditargetkan sebesar **Rp 3.448.451.881.576,29** dengan realisasi sebesar **Rp 3.439.731.059.982,29** atau **99,75%**.

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.B.1
Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun 2016

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	425.023.299.664,29	502.853.978.608,29	118,31
2.	Dana Perimbangan	2.341.346.398.250,00	2.308.269.278.031,00	98,59
3	Lain-lain Pendapatan	682.082.183.662,00	628.607.803.343,00	92,16
Jumlah		3.448.451.881.576,29	3.439.761.059.982,29	99,75

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah mencapai target yang diharapkan. Realisasi APBD Tahun 2016 realisasi sebesar Rp 502.853.978.608,29 atau mencapai 118,31% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp 461.807.474.031,49 maka terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp 41.046.504.576,80 atau 8,88%. Untuk dana perimbangan 2016 sebesar Rp 2.308.269.278.031,00 atau 98,59% dari target yang direncanakan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp 1.893.231.262.923,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 415.038.015.108,00 atau 21,92%. Sedangkan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasinya sebesar



Rp 628.607.803.343,00 atau 92,16%, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp 1.116.162.038.863,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 487.554.235.520,00 atau 77,56%.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 14,62% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2016, sedangkan dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, 67,11% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 18,27%.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp 425.023.299.664,29 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp 502.853.978.608,29 atau mencapai 118,31%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Malang berasal dari Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu mencapai 118,77% dari target anggaran Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.B.2
Perincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Hasil Pajak Daerah	156.960.000.000,00	191.399.578.172,88	121,94
2	Hasil Retribusi Daerah	37.654.806.591,00	40.826.042.619,00	108,42
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.582.005.505,25	14.294.282.184,44	98,03
4	Lain Lain Pendapatan yang sah	215.826.487.568,04	256.334.075.631,97	118,77
Jumlah		425.023.299.664,29	502.853.978.608,29	118,31



Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah melampaui target relatif lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2016 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 2.341.346.398.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.308.269.278.031,00 atau mencapai target 98,59%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.B.3

Perincian Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	148.170.570.000,00	145.219.916.051,00	98,01
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.694.884.660.000,00	1.694.884.660.000,00	100
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	498.291.168.250,00	468.164.701.980,00	93,95
Jumlah		2.341.346.398.250,00	2.308.269.278.031,00	98,59

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2016



direncanakan sebesar Rp 682.082.183.662,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 628.607.803.343,00 atau mencapai 92,16. Adapun perincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.B.4
Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Hibah	25.250.000.000,00	25.316.252.600,00	100,26
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	273.526.846.142,00	219.986.213.243,00	80,43
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	285.647.131.000,00	285.647.131.000,00	100
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	97.658.206.500,00	97.658.206.500,00	100
Jumlah		682.082.183.662,00	628.607.803.343,00	92,16

Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2016 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:



1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya;
4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
5. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang:

1. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 3.769.545.761.843,84 dan dapat direalisasikan Rp 3.543.196.904.343,89 atau mencapai 94,00%, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.B.5
Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.077.192.903.136,82	1.986.012.504.312,50	95,61
2	Belanja Langsung	1.692.352.858.702,02	1.557.184.400.031,39	92,01
Jumlah		3.769.545.761.843,84	3.543.196.904.343,89	94,00



Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 56,05% dari realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2016 dan sisanya sebesar 43,95% disumbangkan dari belanja langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2016, dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 2.077.192.903.136,82 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.986.012.504.312,50 atau 95,61% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.B.6
Perincian Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.519.142.003.336,82	1.444.198.133.600,00	95,07
2	Belanja Hibah	75.916.369.000,00	65.138.352.100,00	85,80
3	Belanja Bantuan Sosial	13.809.650.000,00	12.476.650.000,00	90,35
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	31.267.885.424,00	28.682.058.300,50	91,73
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	430.056.995.376,00	429.346.209.612,00	99,83
6	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	6.171.100.700,00	88,16
Jumlah		2.077.192.903.136,82	1.986.012.504.312,50	95,61



C. PRESTASI TAHUN 2016

Tingkat Nasional

1. Anugrah Adipura Kirana Periode 2015 - 2016 Kategori Kota Kecil untuk Kota Kepanjen dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya dari Kementerian PP dan PA Republik Indonesia.
3. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) untuk Home Care Permata Turen UPT Puskesmas Turen dari Kementerian PAN & RB.
4. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk Desa Pujon Kidul Kec. Pujon dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk Desa Pondok Agung Kec. Kasembon dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk Desa Bendosari Kec. Pujon dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk Desa Banjarejo Kec. Ngantang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016 SMPN 1 Wajak dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016 SMPN 1 Sumberpucung dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016 SMPN 2 Kepanjen dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016 SMAN 1 Kepanjen dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016 SMKN 1 Singosari dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Peringkat Terbaik 1 Program Menuju Provinsi Hijau dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Anugrah Adipura Kirana Periode 2015 - 2016 Kategori Kota Kecil untuk Kota Kepanjen dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. 13 Besar Desa Wisata Tingkat Nasional untuk Desa Gubugklakah dan Desa Pujon Kidul oleh Kementrian Pariwisata.
16. 5 Besar Pengelola Homestay Terbaik Tingkat Nasional untuk Homestay Suheri Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon oleh Kementrian Pariwisata.
17. Kabupaten Potensial untuk Kategori Pariwisata dari Frontier, Tempo.
18. Penghargaan stand terbaik III pada ajang Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2016 oleh Kementrian Pariwisata.
19. Wahana Tata Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia.



-
20. Juara 1 dengan kategori Kabupaten menengah dalam Indonesia Smart Nation Award 2016. oleh Citiasia.inc.

Tingkat Provinsi

1. 9 Besar Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Provinsi Jawa Timur untuk Perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat (PERKESWAMAS) UPT Puskesmas Bantur oleh Gubernur Jawa Timur.
2. Penghargaan Kalpataru Kategori Pengabdian Lingkungan Tahun 2016 kepada Bp. Supadi Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu Kec. Dau oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Penghargaan Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan Tahun 2016 Bp. Saptoyo Konservator Pesisir Pantai Sendang Biru Kec. Sumbermanjing Wetan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Penghargaan Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan Tahun 2016 untuk Kelompok Tani Lestari Makmur Desa Babadan Kec. Ngajum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2016 untuk SMA Negeri 1 Bululawang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2016 untuk SD Negeri Sumberpucung 3 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Pelaksana Terbaik I Kecamatan Sayang Ibu Desa Peniwen Kecamatan Kromengan oleh Gubernur Jawa Timur.
8. Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teladan - Juara III Tingkat Propinsi an. Suwarno (Juru UPTD SDA dan Irigasi Tumpang) oleh Dinas PU Pengairan Prov. Jawa Timur.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja sebagai berikut:

Misi 1 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%	20%	100%
3	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	5%	8%	160%
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	5%	29%	580%
Rata – Rata Capaian (%)					235%



Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	77,50	82	105,8%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	WTP	-	-
3	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		1. Kategori Nilai LPPD	Sangat Baik Posisi 11 Besar Nasional	Menunggu pengumuman pada bulan april	
Rata – Rata Capaian (%)					102,9%

Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	66,64 - 67,24	67,54	100,4%
		2. Indeks GINI	0,331 - 0,327	0,330	100,9%
Rata – Rata Capaian (%)					100,6%



Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,59%	5,43%	97,13%
Rata – Rata Capaian (%)					97,13%

Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	≥ 70%	88,10%	125,86%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	≤ 10%	2%	180%
Rata – Rata Capaian (%)					152,93%



Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat

Tujuan 1

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	60%	63,32%	105,53%
		2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	44,81%	50,64%	113,01%
		3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	3,43%	4,42%	128,9%
		4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	70%	71%	101%
Rata – Rata Capaian (%)					112,11%

Tujuan 2

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	82%	72,65%	88,59%
		2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	80,23%	75,5%	94,10%
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	97,50%	97,50%	100%
2	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	8,34%	6,85%	82,13%



	pengendalian daya rusak air	2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	65,00%	70,02%	107,72%
Rata – Rata Capaian (%)					94,51%

Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,56	64,03	117,36%
2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	17 desa	27 desa	158,8%
		2. Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian (%)					125,38%

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja sasaran pada setiap Misi dalam mencapai Visi Kabupaten Malang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- MISI 1** : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum tercapai **235%**, dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;
- MISI 2** : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi, tercapai **102,9%** dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;
- MISI 3** : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia tercapai **100,6%**, dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;



-
- MISI 4** : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif, tercapai **97,13%**, dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;
- MISI 5** : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa tercapai **152,93%**, dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;
- MISI 6** : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat tercapai **112,11% dan 94,51%** dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**;
- MISI 7** : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup tercapai **125,38%** dengan parameter penilaian **Sangat Berhasil**.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap Misi pada Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian Visi Kabupaten Malang.

Malang, Januari 2017

BUPATI MALANG


Dr. H. RENDRA KRESNA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. RENDRA KRESNA

Jabatan : Bupati Malang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malang, Oktober 2016

BUPATI MALANG

Dr. H. RENDRA KRESNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

- MISI 1** : **Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum**
- Tujuan** : **Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%
3. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	5%
	2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	5%

Program :	Anggaran (Rupiah)
a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.634.015.000,00
b. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan	338.530.000,00
c. Program Pendidikan Non Formal	484.310.000,00
d. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas	117.500.000,00
e. Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	380.038.900,00
f. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	261.680.600,00
g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.401.522.000,00
h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.055.025.950,00
i. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.027.895.000,00
j. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	800.000.000,00
k. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	455.940.000,00
l. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	1.280.112.200,00

Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
m. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	104.141.000,00
n. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.265.547.500,00
o. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	239.452.000,00
Jumlah Total	16.845.710.150,00

Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	77,50
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	WTP
3. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B
	2. Kategori Nilai LPPD	Sangat Baik Posisi 11 Besar Nasional

Program :	Anggaran (Rupiah)
a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	721.881.500,00
b. Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.934.173.000,00
c. Program Peningkatan Pelayanan Publik	828.817.500,00
d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	87.598.000,00
e. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	304.800.000,00
f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.647.406.900,00
g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.942.047.625,00
h. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	16.173.357.300,00
i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.643.322.700,00
j. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.957.458.000,00
k. Program Pengembangan Data/Informasi	965.779.500,00
l. Program Program Kerjasama Pembangunan	832.072.850,00
m. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	268.902.100,00
n. Program Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	502.090.000,00
o. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	870.975.000,00
p. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1.322.050.800,00
q. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1.800.000,00
r. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	141.744.500,00
s. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	370.290.800,00
t. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.668.564.500,00
Jumlah Total	51.185.132.575,00

Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	66,64 - 67,24
	2. Indeks GINI	0,331 - 0,327

Program :	Anggaran (Rupiah)
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	130.000.000,00
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	15.702.519.725,00
c. Program Pendidikan Menengah	212.830.000,00
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	406.500.000,00
e. Program Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	50.000.000,00
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	11.564.215.000,00
g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	591.380.000,00
h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)	3.166.571.921,00
i. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	250.000.000,00
j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.660.252.750,00
k. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.478.083.250,00
l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.326.931.500,00
m. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	13.414.162.000,00
n. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	989.820.000,00
o. Program Peningkatan Iklim Investasi	57.050.000,00
p. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	664.204.000,00
q. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspora	521.000.000,00
r. Program Resi Gudang	162.595.001,00
s. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	114.000.500,00
t. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	553.720.500,00
u. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.116.651.000,00
v. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	398.151.700,00
w. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	357.775.000,00
x. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	4.875.000.000,00
Jumlah Total	59.763.413.847,00

Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,59%

Program :	Anggaran (Rupiah)
a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	328.355.000,00
b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	5.613.169.799,00
c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.869.964.900,00
d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.847.331.919,00
e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.077.185.000,00
f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.791.278.900,00
g. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.230.000,00
h. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan	229.751.600,00
i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	4.208.433.951,00
j. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	11.660.755.000,00
k. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	174.720.000,00
l. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	25.269.772.850,00
m. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	174.720.000,00
n. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	388.000.000,00
o. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	25.000.000,00
p. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	295.108.500,00
Jumlah Total	54.977.777.419,00

Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Responsive, Transparan dan Akuntabel

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	1. Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	≥ 70%
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	≤ 10%

Program :	Anggaran (Rupiah)
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.110.112.100,00
b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	185.466.300,00
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	2.719.825.100,00
d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.418.787.200,00
e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	345.000.000,00
f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	6.455.812.399,00
g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	893.670.000,00
h. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	776.765.300,00
i. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	79.100.000,00
Jumlah Total	13.984.538.399,00

Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	60%
	2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	44,81%
	3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	3,43%
	4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	70%

Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	82%
	2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	80,23%
	3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	97,50%
2. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	8,34%
	2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	65%

Program :	Anggaran (Rupiah)
a. Program Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	34.388.654.000,00
b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	191.673.013.650,00
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	278.150.000,00
d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	142.325.000,00
e. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas	956.141.000,00
f. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan	152.210.000,00

Fasilitas LLAJ	
g. Program Infrastruktur Pedesaan	23.844.330.000,00
h. Program Pengembangan Perumahan	1.312.646.492,00
i. Program Lingkungan Sehat Perumahan	150.720.000,00
j. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	143.054.000,00
k. Program Pemanfaatan Ruang	169.478.000,00
l. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	22.999.471.000,00
m. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	18.652.478.598,00
n. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6.602.527.000,00
o. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.300.000.000,00
p. Program Pengembangan Kemitraan	659.280.000,00
q. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi	178.006.000,00
r. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	25.269.772.850,00
Jumlah Total	329.872.257.590,00

Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,56
2. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	17 desa
	2. Persentase Penanganan Bencana	100%

Program :	Anggaran (Rp)
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	4.856.191.827,00
b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	149.560.000,00
c. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	95.550.000,00
d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.883.969.040,00
e. Program Perlindungan dan Konservasi SDA	1.204.490.000,00
f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	564.625.000,00
g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	235.979.500,00
h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	1.109.855.000,00
i. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2.663.832.100,00
Jumlah Total	14.764.052.467,00

Malang, Oktober 2016

BUPATI MALANG

Dr. H. RENDRA KRESNA



RENCANA KERJA TAHUNAN

KABUPATEN : MALANG

Tahun : 2016

Misi 1 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum

Tujuan : Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/ Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan b. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan c. Program Pendidikan Non Formal d. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas	a. 1.634.015.000,00 b. 338.530.000,00 c. 484.310.000,00 d. 117.500.000,00
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%	e. Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan f. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	e. 380.038.900,00 f. 261.680.600,00 g. 6.401.522.000,00 h. 2.055.025.950,00



3	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	5%	i. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	i. 1.027.895.000,00
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	5%	j. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	j. 800.000.000,00
				k. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	k. 455.940.000,00
				l. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	l. 1.280.112.200,00
				m. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	m. 104.141.000,00
				n. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	n. 1.265.547.500,00
				o. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	o. 239.452.000,00
Jumlah Total Anggaran Program					16.845.710.150,00



Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Survey	77,50	a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	a. 721.881.500,00
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	WTP	b. Program Penataan Administrasi Kependudukan	b. 2.934.173.000,00
3	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	c. Program Peningkatan Pelayanan Publik	c. 828.817.500,00
		2. Kategori Nilai LPPD	Sangat Baik Posisi 11 Besar Nasional	d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	d. 87.598.000,00
				e. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	e. 304.800.000,00
				f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	f. 1.647.406.900,00
				g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	g. 15.942.047.625,00
				h. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	h. 16.173.357.300,00
				i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	i. 2.643.322.700,00
				j. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	j. 1.957.458.000,00
				k. Program Pengembangan Data/Informasi	k. 965.779.500,00
				l. Program Program Kerjasama Pembangunan	l. 832.072.850,00
				m. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	m. 268.902.100,00
				n. Program Penataan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	n. 502.090.000,00
				o. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	o. 870.975.000,00



				p. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	p. 1.322.050.800,00
				q. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	q. 1.800.000,00
				r. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	r. 141.744.500,00
				s. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	s. 370.290.800,00
				t. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	t. 2.668.564.500,00
Jumlah Total Anggaran Program					51.185.132.575,00



Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	66,64 - 67,24	a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	a. 130.000.000,00
		2. Indeks GINI	0,331 - 0,327	b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	b. 15.702.519.725,00
				c. Program Pendidikan Menengah	c. 212.830.000,00
				d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	d. 406.500.000,00
				e. Program Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	e. 50.000.000,00
				f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	f. 11.564.215.000,00
				g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	g. 591.380.000,00
				h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)	h. 3.166.571.921,00
				i. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	i. 250.000.000,00
				j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	j. 1.660.252.750,00
				k. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	k. 1.478.083.250,00
				l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	l. 1.326.931.500,00
				m. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	m. 13.414.162.000,00
				n. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	n. 989.820.000,00
				o. Program Peningkatan Iklim Investasi	o. 57.050.000,00



				p. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	p. 664.204.000,00
				q. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspora	q. 521.000.000,00
				r. Program Resi Gudang	r. 162.595.001,00
				s. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	s. 114.000.500,00
				t. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	t. 553.720.500,00
				u. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	u. 1.116.651.000,00
				v. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	v. 398.151.700,00
				w. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	w. 357.775.000,00
				x. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	x. 4.875.000.000,00
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM					59.763.413.847,00



Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,59%	a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan g. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil h. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak j. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan k. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan l. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	a. 328.355.000,00 b. 5.613.169.799,00 c. 1.869.964.900,00 d. 1.847.331.919,00 e. 1.077.185.000,00 f. 1.791.278.900,00 g. 24.230.000,00 h. 229.751.600,00 i. 4.208.433.951,00 j. 11.660.755.000,00 k. 174.720.000,00 l. 25.269.772.850,00



				m. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	m. 174.720.000,00
				n. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	n. 388.000.000,00
				o. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	o. 25.000.000,00
				p. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	p. 295.108.500,00
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM					54.977.777.419,00



Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Responsive, Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	$\geq 70\%$	a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa c. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	a. 1.110.112.100,00 b. 185.466.300,00 c. 2.719.825.100,00
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\leq 10\%$	d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan h. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa i. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	d. 1.418.787.200,00 e. 345.000.000,00 f. 6.455.812.399,00 g. 893.670.000,00 h. 776.765.300,00 i. 79.100.000,00
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM					13.984.538.399,00



Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika

Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	60%	a. Program Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	a. 34.388.654.000,00
		2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	44,81%	b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	b. 191.673.013.650,00
		3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	3,43%	c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	c. 278.150.000,00
		4. Persentase Wilayah yang Terlayani Jaringan Internet	70%	d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	d. 142.325.000,00
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	82%	e. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas	e. 956.141.000,00
				f. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	f. 152.210.000,00
				g. Program Infrastruktur Pedesaan	g. 23.844.330.000,00
				h. Program Pengembangan Perumahan	h. 1.312.646.492,00
				i. Program Lingkungan Sehat Perumahan	i. 150.720.000,00
				j. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	j. 143.054.000,00
				k. Program Pemanfaatan Ruang	k. 169.478.000,00
				l. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	l. 22.999.471.000,00
				m. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	m. 18.652.478.598,00
				n. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	n. 6.602.527.000,00



	Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pelayanan Air Minum, Sanitasi, dan Prasarana Lingkungan Dasar	2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	80,23%	o. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata p. Program Pengembangan Kemitraan q. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi r. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	o. 2.300.000.000,00
		3. Persentase ketersediaan rumah layah huni	97,50%		p. 659.280.000,00
2	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air	1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi	8,34%		q. 178.006.000,00
		2. Presentase Panjang Saluran Air Sekunder Dalam Kondisi Baik	65%		r. 25.269.772.850,00
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM					329.872.257.590,00



Misi 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan : Meningkatkan Kebersamaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,56	a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	a. 4.856.191.827,00
2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	17 desa	b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	b. 149.560.000,00
		2. Persentase Penanganan Bencana	100%	c. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	c. 95.550.000,00
				d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	d. 3.883.969.040,00
				e. Program Perlindungan dan Konservasi SDA	e. 1.204.490.000,00
				f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	f. 564.625.000,00
				g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	g. 235.979.500,00
				h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	h. 1.109.855.000,00
				i. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	i. 2.663.832.100,00
JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM					14.764.052.467,00

Malang, Oktober 2016

BUPATI MALANG


Dr. H. RENDRA KRESNA



PENGUKURAN KINERJA

KABUPATEN : MALANG

TAHUN : 2016

Misi 1 : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum

Tujuan : Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	20%	20%	100%
3	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	5%	8%	160%
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	5%	29%	580%



Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	77,50	82	105,8%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI	WTP	-	-
3	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		1. Kategori Nilai LPPD	Sangat Baik Posisi 11 Besar Nasional	Menunggu pengumuman pada bulan april	

Misi 3 : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks Pembangunan Manusia	66,64 - 67,24	67,54	100,4%
		2. Indeks GINI	0,331 - 0,327	0,330	100,9%



Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,59%	5,43%	97,13%

Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Responsive, Transparan dan Akuntabel.

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	$\geq 70\%$	88,10%	125,86%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\leq 10\%$	2%	180%



MISI 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan Prasarana Transportasi Telematika Sarana Jalan, dan	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	60 %	63,32%	105,53%
		2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar	44,81 %	50,64%	113,01%
		3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten	3,43 %	4,42%	128,9%
		4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	70%	71%	101%

Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	82%	72,65%	88,59%
		2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah	80,23%	75,5%	94,10%
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	97,50%	97,50%	100%
2		1. Persentase Luas Areal Pertanian	8,34%	6,85%	82,13%



No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air	yang Dilayani Jaringan Irigasi			
		2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	65%	70,02%	107,72%

Misi 7 : **Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.**

Tujuan : **Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan**

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,56	64,03	117,36%
2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	17 desa	27 desa	158,8%
		2. Persentase Penanganan Bencana	100 %	100%	100%

Malang, Januari 2017

BUPATI MALANG

Dr. H. RENDRA KRESNA